



PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJO



MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS



T A H U N
2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/664/2025

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, diperlukan Manajemen Risiko untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dalam huruf a, diperlukan dokumen Manajemen Risiko sebagai arah pelaksanaan pengelolaan risiko yang kemungkinan terjadi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

KEDUA : Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan atas risiko strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo.

KELIMA : Dokumen Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
a. penilaian atas lingkungan pengendalian internal yang ada dan rencana tidak perbaikan yang masih dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Bab III.

- b. penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Bab IV Sub Bab 4.1.
- c. identifikasi risiko strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Bab IV Sub Bab 4.2.
- d. hasil analisis risiko serta daftar risiko prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Bab IV Sub Bab 4.3.
- e. penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Bab V.
- f. pengkomunikasian pengendalian yang dibangun Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Bab VI.
- g. rancangan pemantauan atas pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 serta pencatatan kejadian risiko (*Risk Even*) dan rencana tindak pengendalian sebagaimana tercantum dalam Bab VII.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Oktober 2025



BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 100.3.3.2/664/2025
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari SPIP yang memuat pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah. Pengelolaan risiko dilakukan pada tingkat strategis Pemda, strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tingkat operasional OPD.

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan dokumen ini telah memperhatikan berbagai referensi serta masukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan Perangkat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Selanjutnya, kami berharap agar dokumen ini dapat memberikan nilai tambah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Purworejo, 2 Oktober 2025
Bupati Purworejo
YULI HASTUTI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.2
1.3. Maksud dan Tujuan	I.3
1.4. Ruang Lingkup	I.4
1.5. Sistematika Penyajian	I.4
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP.....	II.1
2.1. Pengertian SPIP	II.1
2.2. Tujuan SPIP	II.1
2.3. Unsur SPIP	II.2
2.2.1 Lingkungan Pengendalian.....	II.2
2.2.2 Penilaian Risiko	II.3
2.2.3 Kegiatan Pengendalian	II.4
2.2.4 Informasi dan Komunikasi	II.5
2.2.5 Pemantauan Berkelanjutan	II.6
2.4. Hubungan Manajemen Risiko Dengan SPIP	II.6
2.5. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	II.9
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	III.1
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	III.1
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	III.2
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	III.7
BAB IV PENILAIAN RISIKO	IV.1
4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan.....	IV.1
4.2. Identifikasi Risiko.....	IV.10
4.3. Analisis Risiko	IV.41
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN	V.1



BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	VI.1
BAB VII PEMANTAUAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern	III.3
Tabel 3. 2 Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	III.8
 Tabel 4. 1 Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029	IV.1
Tabel 4. 2 Konteks Risiko Strategis	IV.2
Tabel 4. 3 Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah	IV.12
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Risiko	IV.41
Tabel 4. 5 Daftar Risiko Prioritas	IV.46
 Tabel 5. 1 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manusia	V.2
Tabel 5. 2 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	V.15
Tabel 5. 3 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	V.21
Tabel 5. 4 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif	V.26
Tabel 5. 5 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, Serta Wilayah Yang Kondusif	V.39
 Tabel 6. 1 Rencana Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun	VI.1
 Tabel 7. 1 Rencana Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan	VII.2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah	II.2
Gambar 2. 2 Definisi Manajemen Risiko	II.7
Gambar 4. 1 Matrik Analisis Risiko Dalam Skala 4.....	IV.41
Gambar 4. 2 Matrik Hasil Analisis Risiko.....	IV.44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Form 1a. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ *Control Environment Evaluation (CEE)*.
2. Form 1b. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Purworejo
3. Form 1c. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo
4. Form 2a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda
5. Form 3a. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
6. Form 4. Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko
7. Form 5. Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas
8. Form 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)
9. Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
10. Form 8. Rencana Dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun
11. Form 9. Rencana Dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pasal 3 ayat (1), dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan pengendalian Intern.

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;



2. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
3. Kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
4. Kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
5. Metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
6. Pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
7. Pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 9 seri E Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 116 seri E Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini adalah:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini adalah untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 guna melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



1.4. Ruang Lingkup

Dalam menyusun dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini, lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Melaksanakan identifikasi risiko-risiko lingkungan pengendalian internal melalui pencermatan terhadap dokumen-dokumen serta informasi-informasi yang ada;
- b. Melaksanakan survey lingkungan pengendalian internal serta menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* simpulan lingkungan pengendalian internal dengan melibatkan pimpinan Perangkat Daerah;
- c. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mengidentifikasi risiko strategis serta melaksanakan survey untuk menentukan skala risiko dengan melibatkan pimpinan Perangkat Daerah;
- d. Menyusun dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.5. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup dan Sistematika Penyajian.

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

Bab ini membahas: 1) Pengertian SPIP; 2) Tujuan SPIP; 3) Unsur SPIP; dan 4) Pernyataan Tanggung Jawab.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bab ini membahas: 1) Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan; 2) Kondisi Lingkungan Pengendalian; dan 3) Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.



BAB IV PENILAIAN RISIKO

Bab ini membahas: 1) Penetapan Tujuan; 2) Identifikasi Risiko; dan 3) Analisis Risiko

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB VII PEMANTAUAN

BAB VIII PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2. Tujuan SPIP

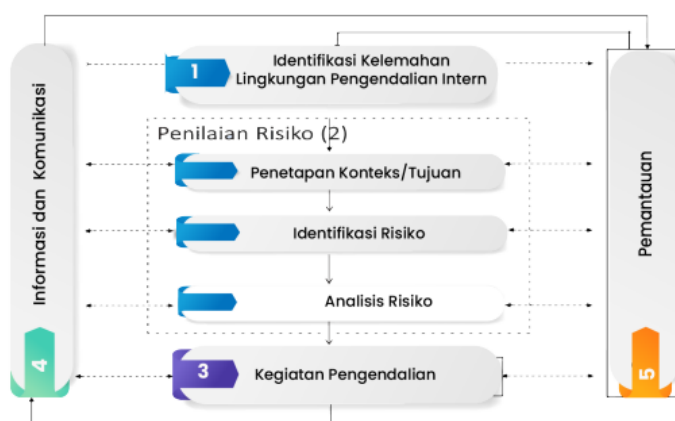
Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien,



keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

2.3. Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern yang diimplementasikan dalam tahapan-tahapan pengelolaan risiko seperti tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

2.2.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang

seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
- g. sumber daya manusia;
- h. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- i. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.2.2 Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Tahapan penilaian risiko yaitu, sebagai berikut:



- a. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko
- b. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benarbenar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
- c. Evaluasi risiko untuk menentukan tindakan atau langkah apa yang harus diambil, dan merupakan pilihan terbaik mensikapi berbagai risiko yang dapat mengganggu tujuan aktivitas organisasi.

2.2.3 Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengendalian risiko dikelompokkan dalam 2 kategori , yaitu prevention and mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk



mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo sekurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Disesuaikan dengan sifat khusus;
- d. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- e. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- f. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

2.2.4 Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Untuk memperoleh informasi yang berguna, mengumpulkan dan mengolah data diharapkan menjadi informasi yang lebih terarah dan penting. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian

informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

2.2.5 Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Purworejo pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah system pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

2.4. Hubungan Manajemen Risiko Dengan SPIP

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa “Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui



pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko”.

Definisi Manajemen Risiko		
No	Standar	
1	ISO 31000	Aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko (ISO 31000: 2009)
2	COSO ERM	Proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris/pengawas, manajemen (dewan direksi) dan personel yang lain, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan diterapkan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi perusahaan dan mengelola risiko-risiko itu di dalam perusahaan, untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (COSO ERM : 2004)
3	AS/NZS	Kultur, proses, dan struktur yang diarahkan kepada manajemen yang efektif mengenai peluang-peluang yang potensial dan pengaruh-pengaruh yang merugikan (AS/NZS 4360: 2004)

Sumber: ISO (2009), COSO (2004), AS/NZS: 2004

Gambar 2. 2 Definisi Manajemen Risiko

Mengacu pada pengertian dari ketiga standar tersebut, pengelolaan risiko (manajemen risiko) pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/ organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.

Ketiga standar tersebut, memiliki kerangka Manajemen Risiko yang sedikit berbeda. Kerangka manajemen risiko ISO 31000 terdiri atas tiga elemen yang saling terkait yaitu dasar praktik atau filosofi manajemen risiko (principle), pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi (kerangka), dan aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait (process). Sedangkan kerangka manajemen risiko menurut COSO ERM terdiri dari 8 komponen saling terkait yang meliputi seluruh tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Delapan komponen tersebut yaitu Lingkungan Internal, Penentuan Tujuan, Identifikasi Kejadian,

Penilaian Risiko, Respon Risiko, Aktivitas Kontrol, Informasi dan Komunikasi, dan Monitoring. Kerangka tersebut serupa dengan kerangka manajemen risiko AS/NZS 4360:2004, dimana terdiri dari 7 komponen utama proses manajemen risiko yaitu komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, monitor dan reviu.

Meskipun memiliki kerangka yang sedikit berbeda, pada intinya, standar tersebut sama-sama menggambarkan suatu penentuan strategi yang didesain untuk mengidentifikasi kemungkinan kondisi/peristiwa potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, untuk memberikan keyakinan yang memadai pencapaian tujuan organisasi dengan penekanan pada budaya, sistem, dan proses manajemen risiko.

Di Indonesia, seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah diharuskan menerapkan sistem pengendalian internal untuk pencapaian tujuan organisasi dengan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pimpinan Instansi Pemerintah juga perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian atas risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko (Lampiran PP No.60 Tahun 2008). Oleh karena itu, framework manajemen risiko, yang merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, dari beberapa standar, dapat dirumuskan sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah komponen integral dari SPIP, dengan tingkat kematangan (maturitas) SPIP secara langsung bergantung pada efektivitas penerapan



manajemen risiko dalam suatu organisasi pemerintah. Penilaian maturitas SPIP melibatkan evaluasi seberapa baik organisasi mengintegrasikan dan melaksanakan proses manajemen risiko, seperti identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, pengelolaan risiko yang baik menjadi indikator penting untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP.

2.5. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Satgas Penyelenggaraan SPIP memandang perlu menjalankan siklus mendorong penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian telah dijalankan.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Unsur SPI yang pertama adalah Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya SPI secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Lingkungan pengendalian akan efektif apabila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai tone at the top (penentu “irama” organisasi).

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Untuk dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD).
- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh hasil bahwa kedelapan unsur telah memadai, namun berdasarkan hasil revidi dokumen terdapat beberapa unsur yang kurang memadai, sehingga diperoleh simpulan survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Terdapat aduan terkait permasalahan perselingkuhan Terdapat aduan terkait pungutan di sekolahan Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, terdapat kesimpulan sebagai berikut: - Level resiko korupsi tinggi pada deskripsi Percaya akan adanya penggunaan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi pada dimensi Pengelolaan anggaran - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan melihat/ mendengar petugas menerima pemberian dalam pelaksanaan tugas pada dimensi Integritas pegawai - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan dimintai uang/ barang atau fasilitas saat berurusan dengan petugas pada dimensi Integritas pegawai Terdapat aduan terkait pelayanan kesehatan Terdapat aduan terkait permasalahan BPJS Terdapat aduan terkait pelayanan kependudukan Terdapat aduan terkait permasalahan DTKS Terdapat aduan terkait pelayanan kantor desa	Memadai		Kurang Memadai	Meskipun hasil survei persepsi menunjukkan level Memadai, akan tetapi berdasarkan reviu terhadap dokumen-dokumen masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian internal seperti tersaji pada kolom d, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penegakan Integritas dan Nilai Etika masih Kurang Memadai.

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran Penagihan dan Pencatatan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Seluruhnya Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Aplikasi E-Pasar Belum Dapat Menyajikan Perhitungan Sanksi Keterlambatan Proses Likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo Belum Selesai Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Bangun Guna Serah Belum Sesuai Ketentuan Penatausahaan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Belum Memadai Pemanfaatan Aset Tetap / Properti Investasi Belum Sepenuhnya Tertib (belum sesuai ketentuan) Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran untuk Biaya Pengujian pada Laboratorium Konstruksi DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan Terdapat aduan terkait pelayanan Parkir Terdapat aduan terkait LPJU				
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengaruh	Memadai		Kurang Memadai	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi



No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
			pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM				Pengaruh pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Memadai		Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai		Memadai		Memadai	
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	Kurang Memadai	Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran Masih terdapat banyak temuan pemeriksaan hasil pekerjaan	Memadai		Kurang Memadai	Meskipun hasil survei persepsi menunjukkan level Memadai, akan tetapi berdasarkan reviu terhadap dokumen-dokumen masih terdapat beberapa



No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8
							kelemahan lingkungan pengendalian internal seperti tersaji pada kolom d, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif masih Kurang Memadai.
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



Dari Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 seperti tergambar pada Tabel 3.1 di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat 3 sub unsur yang memiliki kondisi yang “ kurang memadai”.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan SPIP. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya SPI yang efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPIP, oleh karena itu perlu disusun rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian atas kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang memadai, namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagaimana dirumuskan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Terdapat aduan terkait permasalahan perselingkuhan	Melakukan pembinaan secara intensif kepada ASN minimal 2 kali dalam setahun	BKPSDM	Tahun 2025
		Membuat Surat Edaran Bupati terkait pengawasan internal terhadap perilaku indisipliner	BKPSDM	Tahun 2025
2	Terdapat aduan terkait pungutan di sekolah	Sosialisasi Perbup 52 tahun 2024 kepada wali murid dan pengurus komite	Dindikbud	Tahun 2025
3	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, terdapat kesimpulan sebagai berikut: - Level resiko korupsi tinggi pada deskripsi Percaya akan adanya penggunaan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi pada dimensi Pengelolaan anggaran - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan melihat/ mendengar petugas menerima pemberian dalam pelaksanaan tugas pada dimensi Integritas pegawai - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan dimintai uang/ barang atau fasilitas saat berurusan dengan petugas pada dimensi Integritas pegawai	Membuat Surat Edaran Bupati terkait pengawasan internal Pegawai di masing-masing Perangkat Daerah	BKPSDM	Tahun 2025
		Membuat pakta integritas kepada semua ASN	Inspektorat	Tahun 2025



No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
4	Terdapat aduan terkait pelayanan kesehatan	Monitoring ke Puskesmas tindak lanjut pelatihan service excellent pada petugas yang telah dilatih.	BKPSDM	Tahun 2025
5	Terdapat aduan terkait permasalahan klaim BPJS	Pembuatan aplikasi pendaftaran BPJS Kesehatan PBPU dan BP Pemd dan pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS	Dinkesda	Tahun 2025
6	Terdapat aduan terkait pelayanan kependudukan	Melakukan pembinaan terhadap pegawai	Dindukcapil	Tahun 2025
		Mengadakan pelatihan service excelent kepada petugas layanan	Dindukcapil	Tahun 2025
		Merevisi dan mempermudah SOP pelayanan supaya masyarakat tidak kesulitan	Dindukcapil	Tahun 2025
7	Terdapat aduan terkait permasalahan DTKS	Melakukan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan penduduk tidak mampu sesuai kondisi sebenarnya	DPPPAPMD	Tahun 2027
8	Terdapat aduan terkait pelayanan kantor desa	Melakukan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku	DPPPAPMD	Tahun 2026
9	Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran	Melakukan pembinaan secara intensif kepada semua Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengendalian secara tertib sesuai peraturan yang berlaku terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2025
10	Penagihan dan Pencatatan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Seluruhnya Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Aplikasi E-Pasar	Melakukan pengembangan aplikasi E-Retribusi	DKUKMP	Tahun 2025



No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
	Belum Dapat Menyajikan Perhitungan Sanksi Keterlambatan			
11	Proses Likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo Belum Selesai	Meningkatkan integritas manajemen BUMD	Bag. Perekonomian dan SDA	Tahun 2025
		Optimalisasi peran Dewan Pengawas dan Dewan Pembina	Bag. Perekonomian dan SDA	Tahun 2025
12	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Bangun Guna Serah Belum Sesuai Ketentuan	Memastikan dalam penyusunan perjanjian kerjasama harus lebih jelas hak dan kewajiban beserta konsekuensi atas pelanggaran perjanjian	DKUKMP	Tahun 2027
13	Penatausahaan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Belum Memadai	Melaksanakan sesuai SOP	BPKPAD	Tahun 2025
		Melaksanakan rekon dengan DPMPSTSP setiap triwulan	BPKPAD	Tahun 2025
14	Pemanfaatan Aset Tetap / Properti Investasi Belum Sepenuhnya Tertib (belum sesuai ketentuan)	Melakukan pengalihan status tanah dan bangunan	BPKPAD	Tahun 2025
15	Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran untuk Biaya Pengujian pada Laboratorium Konstruksi DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan	Mengimplementasikan Perbup nomor 63 tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi	DPUPR	Tahun 2025
		Mengimplementasikan SOP	DPUPR	Tahun 2025
16	Terdapat aduan terkait pelayanan Parkir	Melakukan pembinaan kepada petugas parkir 3 kali setahun	Dinhub	Tahun 2025
		Koordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban parkir liar	Dinhub	Tahun 2025
		Implementasi layanan aduan Menduan Nyengkir	Dinhub	Tahun 2025



No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
17	Terdapat aduan terkait LPJU	Melakukan pengusulan penambahan LPJU sesuai kewenangan jalan	Dinhub	Tahun 2025
		Melakukan pengusulan bantuan sarpras pemeliharaan PJU sesuai kewenangan jalan	Dinhub	Tahun 2025
		Mengoptimalkan pemeliharaan dan layanan aduan permasalahan PJU	Dinhub	Tahun 2025
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengaruh pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM	Merevisi Perbup Manajemen Talenta	BKPSDM	Tahun 2025
		Melaksanakan implementasi Perbup Manajemen Talenta	BKPSDM	Tahun 2025
III	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif			
1	Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran	Melakukan probity audit terhadap proyek strategis	Inspektorat	Tahun 2025
2	Masih terdapat banyak temuan pemeriksaan hasil pekerjaan	Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam melaksanakan consulting and assurance kepada semua Perangkat Daerah	Inspektorat	Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2026-2029 yaitu “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)” yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 dirinci secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan supaya lebih terarah dalam implementasinya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 meliputi 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Visi : Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI) Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera Misi 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Misi 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	1. Meningkatnya Kualitas Manusia 2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Misi 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi		5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif, serta wilayah yang kondusif, serta wilayah yang kondusif

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 diatas, maka ditetapkan konteks risiko strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 pada semua sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Konteks Risiko Strategis

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Nama Perangkat Daerah Terkait	Semua Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
IKU Sasaran RPJMD	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Infrastruktur Daerah 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 4. Indeks Risiko Bencana 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6. Tingkat Pengangguran Terbuka 7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 8. Indeks Reformasi Birokrasi 9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Indeks Ketahanan Nasional
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Infrastruktur Daerah 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 4. Indeks Risiko Bencana 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6. Tingkat Pengangguran Terbuka 7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 8. Indeks Reformasi Birokrasi 9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Indeks Ketahanan Nasional

Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program unggulan terkait Sasaran Meningkatnya kualitas manusia: 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 5. Program Pengembangan Kebudayaan 6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 7. Program Pembinaan Sejarah 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 9. Program Pengelolaan Permuseuman 10. Program Pembinaan Perpustakaan 11. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 14. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 15. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17. Program Penanganan Bencana 18. Program Pemberdayaan Sosial 19. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 20. Program Rehabilitasi Sosial 21. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 22. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 23. Program Pengendalian Penduduk 24. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 25. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 26. Program Perlindungan Perempuan 27. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 28. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 29. Program Perlindungan Khusus Anak 30. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
--	--

	31. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 32. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program unggulan terkait Sasaran Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah: 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 9. Program Pengembangan Perumahan 10. Program Kawasan Permukiman 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program unggulan terkait Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana: 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan 10. Program Penanggulangan Bencana 11. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
--	--

	Program unggulan terkait Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif: 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 9. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 10. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 11. Program Penataan Desa 12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 13. Program Administrasi Pemerintahan Desa 14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 16. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 18. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 19. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 20. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 21. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 22. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 23. Program Pengembangan Umkm 24. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 25. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 26. Program Pengembangan Ekspor 27. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 28. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 29. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 30. Program Promosi Penanaman Modal 31. Program Pelayanan Penanaman Modal
--	---

	32. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 33. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 34. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 35. Program Pemasaran Pariwisata 36. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 37. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 38. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 39. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 40. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 41. Program Perencanaan Tenaga Kerja 42. Program Penempatan Tenaga Kerja 43. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 44. Program Hubungan Industrial 45. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 46. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 47. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 48. Program Penanganan Kerawanan Pangan 49. Program Pengawasan Keamanan Pangan Program unggulan terkait Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif: 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Riset dan Inovasi Daerah 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 7. Program Kepegawaian Daerah 8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Program Penyelenggaraan Pengawasan 10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 12. Program Pendaftaran Penduduk
--	---

	13. Program Pencatatan Sipil 14. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 15. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 16. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 17. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 18. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 19. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 20. Program Pengelolaan Arsip 21. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 22. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23. Program Perekonomian dan Pembangunan 24. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 25. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 26. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 27. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 28. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 29. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 30. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 32. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 33. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 34. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 35. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 36. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Nama Perangkat Daerah terkait	Perangkat Daerah terkait Sasaran Meningkatnya kualitas manusia: 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. DINAS KESEHATAN DAERAH 3. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	4. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Perangkat Daerah terkait Sasaran Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah: 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3. DINAS PERHUBUNGAN Perangkat Daerah terkait Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana: 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Perangkat Daerah terkait Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif: 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN 7. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 9. DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Perangkat Daerah terkait Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif: Semua Perangkat Daerah
--	--

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Sasaran 1: Meningkatnya kualitas manusia IKU: Indeks Pembangunan Manusia Sasaran 2: Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah IKU: Indeks Infrastruktur Daerah Sasaran 3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana IKU: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Risiko Bencana Sasaran 4: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif IKU: Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sasaran 5: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif IKU: Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Ketahanan Nasional
--	---

Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029, Bapperida, 2025

4.2. Identifikasi Risiko

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko dilakukan untuk menggali kemungkinan kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dalam rangka menjamin perolehan

identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko dilakukan dengan *Focus Discussion Group (FGD)* dengan Perangkat Daerah terkait.

Hasil identifikasi risiko memuat informasi tentang uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko terhadap 5 (lima) sasaran strategis Pemerintah Daerah, diperoleh daftar risiko sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif									
	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah	RSP.25.01.01.01	Bupati	Sarana prasarana pendidikan Non Formal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terbatas (kondisi eksisting ada 10 PKBM, ada kendala dalam akreditasi)	Internal	C	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Pemerataan PKBM kurang mendapatkan perhatian	Internal	C	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Eksternal	C	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	Bupati	Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Eksternal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Faktor sosial budaya yang masih menganggap bahwa pendidikan formal tidak penting	Eksternal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Sarana prasarana pendidikan belum merata	Internal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kualitas tenaga pendidik kurang bersaing	Internal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kurikulum kurang bersaing	Internal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	Bupati	Belum cukup dilakukan sinergi dengan instansi terkait maupun swasta	Internal, Eksternal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	Bupati	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Kesehatan	Eksternal	C	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tidak terpantaunya sasaran yang seharusnya menerima pelayanan dasar	Eksternal	C	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Belum semua masyarakat tercover jaminan kesehatan gratis	Eksternal	C	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	Bupati	Ketersediaan rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi, tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah belum memadai	Internal, Eksternal	C	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kurangnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dari Pemerintah mengenai pentingnya PHBS	Internal, Eksternal	C	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	Bupati	Penanganan PHBS masyarakat masih parsial	Internal, Eksternal	C	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	Bupati	Pendapatan masyarakat rendah	Eksternal	C	Daya beli masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
	Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	Bupati	- Panjang jalan kewenangan kabupaten yang ditangani tidak berbanding lurus dengan kemampuan pendanaan - Penanganan infrastruktur jalan tidak berdasarkan prioritas kewenangan Kabupaten	Internal	C	- Peningkatan biaya transportasi - Konektivitas wilayah yang terputus	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Kurangnya intervensi kegiatan terkait penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan				
			Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	Bupati	- Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) - Belum optimalnya sistem basis data terkait air minum - Belum optimalnya kelembagaan pengelola SPAM - Keterbatasan sumber daya air	Internal, Eksternal	C	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih rendahnya	RSP.25.03.01.10	Bupati	Belum optimalnya pembangunan dan	Internal	C	- Penurunan derajat	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			akses sanitasi aman			pengembangan sistem air limbah			kesehatan masyarakat	
			Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	Bupati	- Masih terdapat area blankspot	Internal	C		Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	Bupati	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan belum meratanya persebaran alat kelengkapan jalan yang terpasang pada jalan kewenangan kabupaten	Internal	C	Meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih tingginya timbunan	RSP.25.03.01.13	Bupati	Belum optimalnya penyediaan sarana dan	Internal	C	- Penurunan derajat	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sampah yang belum terolah di fasilitas pengelolaan sampah			prasarana pengolahan sampah			kesehatan masyarakat	
			Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	Bupati	Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Internal	C	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat
	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	Bupati	Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal	Internal	C	- Menurunnya kualitas ekosistem air - Menurunnya derajat kesehatan masyarakat pengguna sumber air	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kurang terkontrolnya penggunaan pupuk non organik	Internal	C		
						Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya membuang sampah dan limbah ke sungai	Internal	C		
						Kurangnya akses sanitasi yang layak	Internal	C		
						Pencemaran air yang dimungkinkan bersumber dari luar Kabupaten Purworejo	Eksternal	C		
			Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	Bupati	Pengendalian emisi yang masih rendah	Internal	C	- Menurunnya kualitas udara - Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kurangnya kepatuhan industri dalam mengelola lingkungan	Internal	C		
						Berkurangnya Luasan tutupan vegetasi yang dapat menyerap emisi dari kendaraan bermotor dan industri berkurang	Internal	C		
			Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	Bupati	Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbangun	Internal	C	Degradasi/penurunan kualitas lahan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia.	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Risiko Bencana	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	Bupati	- Kolaborasi antar pihak belum optimal - Sarpras belum memadai (EWS, rambu masih kurang) - Belum memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) - Kapasitas SDM masih terbatas (pemahaman masyarakat terkait EWS dan pentingnya mitigasi bencana kurang, kapasitas petugas penanganan bencana belum optimal) - Belum semua desa membentuk destana	Internal	C	Risiko bencana tinggi yang mengancam keselamatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	Bupati	- Pengelolaan destinasi pariwisata kurang maksimal - SDM Pelaku pariwisata belum optimal - Aksesibilitas dan amenitas belum optimal - Kolaborasi antar stakeholder pendukung pariwisata belum optimal	Internal, Eksternal	C	PDRB sektor akomodasi dan makan minum rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	Bupati	- Sarana (bibit, pupuk, sarana melaut) dan prasarana (irigasi, JUT) pertanian dan perikanan belum memadai - Anomali iklim/cuaca - Serangan hama penyakit - Regenerasi SDM pertanian lambat - Alih fungsi lahan pertanian	Internal, Eksternal	C	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						menjadi non pertanian - Terbatasnya luas lahan perikanan - Sumber daya air perikanan masih terbatas karena harus menggunakan sumur - Keterbatasan pakan ikan				
			Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	Bupati	Pengolahan hasil pertanian dan perikanan kurang maksimal - Mayoritas Industri Berskala RumahTangga/SkalaKecil - Infrastruktur Pendukung Terbatas	Internal, Eksternal	C	Laju pertumbuhan ekonomi rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	Bupati	-Iklim investasi belum kondusif - infrastruktur belum	Eksternal	C	Pertumbuhan ekonomi rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						memadai - daya saing harga				
			Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	Bupati	- Kreativitas dan permodalan pelaku usaha kurang memadai - Jiwa kewirausahaan masyarakat masih rendah - Tata kelola UMKM belum optimal	Internal	C	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	Bupati	Berkurangnya dana transfer, rendahnya PAD, Pengelolaan anggaran kurang efisien	Eksternal	UC/C	Pertumbuhan ekonomi rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	Bupati	Skill tenaga kerja kurang bersaing	Internal	C	Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
						Akses lapangan kerja dan berusaha terbatas	Internal/ Eksternal	C		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	Bupati	1. Faktor kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dan memastikan pangan yang baik bagi keluarga. 2. kurangnya keamanan pangan 3. terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat	Eksternal/ Internal	C	Ketercukupan gizi masyarakat rendah	
						Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Internal	C		
						Berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji	Eksternal	C		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	Bupati	produksi pertanian dan perikanan menurun	Internal	C	Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi	
			Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	Bupati	1. kurangnya akses ekonomi 2. kurangnya akses fisik 3. adanya bencana alam	Internal	C	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah	
	Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	Bupati	- Pedoman perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang optimal - pengelolaan risiko belum efektif diimplementasikan dalam pencapaian tujuan - sistem manajemen kinerja	Internal	C	Nilai SAKIP kurang maksimal	Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						belum sepenuhnya terintegrasi				
			Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	Bupati	Rumusan dan target kinerja Perangkat Daerah kurang efektif	Internal	C	Pemborosan anggaran	Masyarakat, Pemerintah
			Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	Bupati	- Keterbatasan personil APIP - hasil evaluasi belum mampu memberikan rekomendasi - belum terdapat mekanisme monev yang baku untuk memantau hasil evaluasi AKIP	Internal	C	Nilai SAKIP kurang maksimal	Perangkat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	Bupati	- belum memiliki Tim Koordinasi SPBE yang berfungsi optimal - Penerapan kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan	Internal	C	Kinerja pemerintahan kurang efisien	Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						belum sesuai dengan praktik terbaik - belum melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan - Pengelolaan inovasi proses bisnis SPBE belum optimal				
			Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	Bupati	1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap implementasi sistem merit 2. Pemahaman pegawai memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 3. Sistem informasi kepegawaian memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 4. Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit	Internal	C	- kepercayaan masyarakat terhadap sistem merit rendah - kinerja ASN tidak optimal	Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5. Faktor politik memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit				
			Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	Bupati	- Integritas ASN kurang - budaya inovasinya masih rendah	Internal	C	Pelayanan kurang maksimal	Pemerintah
			Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	Bupati	- ego sektoral/mechanisme kerja belum berbasis jejaring - belum optimalnya sakin dan MR - integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja belum optimal - penggunaan aset dan anggaran belum efisien???	Internal	C	Kinerja organisasi kurang maksimal	Pemerintah
			Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	Bupati	'- Kebijakan Pelayanan perlu di evaluasi	Internal	C	Kepuasan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Kapasitas SDM? (Profesionalitas SDM masih kurang) - Sarpras pelayanan belum memadai - Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik kurang optimal - kanal konsultasi dan pengaduan perlu disosialisasikan - inovasi pelayanan publik belum optimal - Digitalisasi arsip belum optimal				
			Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	Bupati	- belum adanya roadmap RB 2025-2029 - belum adanya renaksi RB tematik	Internal	C	Pelayanan kurang maksimal	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	Bupati	- Masih terdapat sasaran program yang belum berorientasi hasil - Masih terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak tepat untuk mengukur capaian sasaran strategis -Kebijakan Penegakan Integritas dan etika, kebijakan standar kompetensi, Kebijakan Manajemen Risiko, kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM, kebijakan kerja sama (kemitraan), sistem pengaduan yang ada belum dilakukan evaluasi - Masih terdapat target Indikator Sastra perangkat daerah dan indikator program	Internal	C	Tujuan/ sasaran daerah tidak tercapai	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						yang belum dapat menggambarkan pencapaian sasaran, antara lain pada sasaran strategis perangkat daerah - Seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja belum mempertimbangkan risiko. Pengendalian yang ada belum diarahkan untuk memitigasi risiko. Maka dari itu, perlu melakukan monitoring pelaksanaan RTP secara berkala. - Kebijakan terkait risiko kemitraan belum menyatu dalam proses perencanaan kegiatan kemitraan - Pimpinan telah				

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan namun belum seluruh kegiatan dilakukan manajemen risiko; 8. Masih terdapat temuan BPK RI terkait permasalahan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan, pajak dan retribusi, kelemahan pengendalian atas penatausahaan keuangan serta dalam pemanfaatan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah; 9. Masih terdapat catatan terkait aset yaitu masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang				

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Milik Daerah dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan				
			Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	Bupati	Implemetasi digitalisasi arsip pada aplikasi SRIKANDI pada perangkat daerah masih sebatas pada arsip/surat masuk saja belum sampai arsip/surat keluar sehingga informasi yang diberkaskan sampai disajikan belum lengkap	Internal	C	Pengelolaan arsip kurang efisien	Pemerintah
			Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40	Bupati	Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam dokumen kebijakan tata kelola data dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 192 Tahun 2021 Tentang Satu	Internal	C	Kebijakan perencanaan pembangunan tidak berbasis data	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Data Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. • Penerapan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Purworejo diperkuat dengan tersedianya dokumen kebijakan SK Bupati Purworejo Nomor 160.18/112/2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Data Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo Tahun 2023.				

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	Bupati	Penyusunan kebijakan belum melibatkan semua stakeholder terkait	Internal	C	Kepercayaan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah
			Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	Bupati	Rumusan indikator kinerja kurang SMART dan kurang menggambarkan sebab akibat dengan jelas	Internal	C	Kinerja tidak dapat diukur dengan maksimal	Masyarakat, Pemerintah
			Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan	RSP.25.35.01.43	Bupati	Komitmen pimpinan kurang	Internal	C	Penyalahgunaan wewenang	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada proses pengesahan anggaran							
			Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	Bupati	Pemangku kepentingan kurang profesional	Internal	C	Kepercayaan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah
			Membayar biaya lebih agar pelayanan dipercepat, pemerasan/p	RSP.25.35.01.45	Bupati	Aparatur kurang profesional	Internal	C	Kepercayaan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ungli, birokrasi rumit, tidak responsif, kepuasan layanan rendah							
			SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	Bupati	Akses pemeriksaan terbatas	Internal	C	Pengawasan internal kurang maksimal	Pemerintah
			Penyuapan/g ratifikasi/pem erasan/jual beli jabatan	RSP.25.35.01.47	Bupati	Pemangku kepentingan kurang profesional	Internal	C	Tata kelola birokrasi kurang maksimal	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	Bupati	Regulasi pengelolaan BMD belum update	Internal	C	Pengelolaan BMD kurang maksimal	Pemerintah
			Penyuapan/g ratifikasi/pem erasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	Bupati	Regulasi tentang pendapatan belum update	Internal	C	Pengelolaan Pendapatan kurang maksimal	Masyarakat, Pemerintah
		Indeks Ketahanan Nasional	Terjadinya konflik sosial/ SARA	RSP.25.40.01.50	Bupati	Kerukunan masyarakat kurang	Eksternal	UC/C	Iklim investasi kurang bagus	Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



4.3. Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Hasil analisis risiko digambarkan kedalam matrik seperti gambar dibawah ini.

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi

Gambar 4. 1 Matrik Analisis Risiko Dalam Skala 4

Adapun hasil analisis risiko atas 5 (lima) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Risiko

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
I	Risiko Strategis				
1	Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah	RSP.25.01.01.01	3	2	6
2	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	4	2	8
3	Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	3	2	6
4	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	3	3	9
5	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	3	3	9
6	Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	3	3	9
7	Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	3	3	9

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
8	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	3	3	9
9	Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	3	3	9
10	Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	3	3	9
11	Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	3	3	9
12	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	3	3	9
13	Masih tingginya timbunan sampah yang belum terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	3	3	9
14	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	3	3	9
15	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	4	3	12
16	Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	3	3	9
17	Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	3	3	9
18	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	3	2	6
19	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	3	3	9
20	Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	3	3	9
21	Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	3	3	9
22	Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	4	3	12
23	Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	3	3	9
24	Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	4	3	12
25	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	3	3	9
26	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	3	3	9
27	Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	3	2	6
28	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	3	2	6
29	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	3	3	9
30	Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	3	3	9
31	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	3	3	9
32	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	3	3	9
33	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	3	3	9

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
34	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	3	2	6
35	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	3	2	6
36	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	3	2	6
37	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	3	2	6
38	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	3	3	9
39	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	3	3	9
40	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40	3	3	9
41	Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	3	3	9
42	Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	3	2	6
43	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran	RSP.25.35.01.43	4	2	8
44	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	4	2	8
45	Membayar biaya lebih agar pelayanan dipercepat, pemerasan/pungli, birokrasi rumit, tidak responsif, kepuasan layanan rendah	RSP.25.35.01.45	4	1	4
46	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	3	2	6
47	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan/jual beli jabatan	RSP.25.35.01.47	4	1	4
48	Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	3	2	6
49	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	4	2	8
50	Terjadinya konflik sosial/ SARA	RSP.25.40.01.50	3	1	3

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



Berdasarkan hasil analisis skala dampak dan skala kemungkinan terhadap 50 risiko yang teridentifikasi tersebut, diperoleh matrik sebagai berikut:

Matrik Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	4				
	Kemungkinan Besar	3			RSP.25.02.01.04 RSP.25.02.01.05 RSP.25.02.01.06 RSP.25.99.01.07 RSP.25.03.01.08 RSP.25.03.01.09 RSP.25.03.01.10 RSP.25.16.01.11 RSP.25.03.01.12 RSP.25.03.01.13 RSP.25.04.01.14 RSP.25.11.01.16 RSP.25.11.01.17 RSP.25.26.01.19 RSP.25.27.01.20 RSP.25.31.01.21 RSP.25.17.01.23 RSP.25.07.01.25 RSP.25.09.01.26 RSP.25.33.01.29 RSP.25.33.01.30 RSP.25.33.01.31 RSP.25.16.01.32 RSP.25.38.01.33 RSP.25.35.01.38 RSP.25.24.01.39 RSP.25.20.01.40 RSP.25.33.01.41	RSP.25.11.01.15 RSP.25.18.01.22 RSP.25.37.01.24
	Kemungkinan Kecil	2			RSP.25.01.01.01 RSP.25.01.01.03 RSP.25.05.01.18 RSP.25.09.01.27 RSP.25.09.01.28 RSP.25.33.01.34 RSP.25.33.01.35 RSP.25.33.01.36 RSP.25.33.01.37 RSP.25.36.01.42 RSP.25.35.01.46 RSP.25.37.01.48	RSP.25.01.01.02 RSP.25.35.01.43 RSP.25.35.01.44 RSP.25.37.01.49
	Sangat Jarang	1			RSP.25.40.01.50	RSP.25.35.01.45 RSP.25.35.01.47

Gambar 4. 2 Matrik Hasil Analisis Risiko

Dari matrik tersebut diatas terlihat jelas bahwa setelah dilakukan analisis terhadap 50 risiko yang berhasil diidentifikasi, terdapat 3 risiko dengan nilai risiko sangat tinggi, 3 risiko dengan nilai risiko rendah, serta sisanya 44 risiko dengan nilai risiko tinggi. Dengan demikian terdapat 47 risiko dengan nilai risiko tinggi dan sangat tinggi yang menjadi risiko prioritas untuk dikelola penanganannya. Adapun 3 risiko dengan nilai rendah yang dianggap tidak menjadi risiko prioritas adalah:

1. Membayar biaya lebih agar pelayanan dipercepat, pemerasan/pungli, birokrasi rumit, tidak responsif, kepuasan layanan rendah;
2. Penyusunan/gratifikasi/pemerasan/jual beli jabatan; dan
3. Terjadinya konflik sosial/ SARA

Sedangkan sisanya sejumlah 47 risiko prioritas yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan perlu ditangani dengan baik dan tepat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Risiko Strategis						
1	Rata-rata lama sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.01	6	Bupati	1. Sarana prasarana pendidikan Non Formal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terbatas (kondisi eksisting ada 10 PKBM, ada kendala dalam akreditasi) 2. Pemerataan PKBM kurang mendapatkan perhatian 3. Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Strategis/ Kebijakan
2	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	8	Bupati	1. Kemampuan ekonomi keluarga rendah 2. Faktor sosial budaya yang masih menganggap bahwa pendidikan formal tidak penting 3. Sarana prasarana pendidikan belum merata 4. Kualitas tenaga pendidik kurang bersaing 5. Kurikulum kurang bersaing	Harapan Lama Sekolah rendah	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	6	Bupati	Belum cukup dilakukan sinergi dengan instansi terkait maupun swasta	Harapan Lama Sekolah rendah	Kemitraan
4	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	9	Bupati	1. Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Kesehatan 2. Tidak terpantaunya sasaran yang seharusnya menerima pelayanan dasar 3. Belum semua masyarakat tercover jaminan kesehatan gratis	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Strategis/ Kebijakan
5	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	9	Bupati	1. Ketersediaan rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi, tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah belum memadai 2. Kurangnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dari Pemerintah mengenai pentingnya PHBS	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Strategis/ Kebijakan
6	Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	9	Bupati	Penanganan PHBS masyarakat masih parsial	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Kemitraan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	9	Bupati	Pendapatan masyarakat rendah	Daya beli masyarakat rendah	Strategis/ Kebijakan
8	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	9	Bupati	1. Panjang jalan kewenangan kabupaten yang ditangani tidak berbanding lurus dengan kemampuan pendanaan 2. Penanganan infrastruktur jalan tidak berdasarkan prioritas kewenangan Kabupaten 3. Kurangnya intervensi kegiatan terkait penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	1. Peningkatan biaya transportasi 2. Konektivitas wilayah yang terputus	Strategis/ Kebijakan
9	Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	9	Bupati	1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) 2. Belum optimalnya sistem basis data terkait air minum 3. Belum optimalnya kelembagaan pengelola SPAM 4. Keterbatasan sumber daya air	Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	9	Bupati	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sistem air limbah	Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Strategis/ Kebijakan
11	Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	9	Bupati	Masih terdapat area blankspot		Strategis/ Kebijakan
12	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	9	Bupati	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan belum meratanya persebaran alat kelengkapan jalan yang terpasang pada jalan kewenangan kabupaten	Meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas	Strategis/ Kebijakan
13	Masih tingginya timbulan sampah yang belum terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	9	Bupati	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Strategis/ Kebijakan
14	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	9	Bupati	Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Strategis/ Kebijakan
15	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	12	Bupati	1. Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal 2. Kurang terkendalinya penggunaan pupuk non organik	1. Menurunnya kualitas ekosistem air	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya membuang sampah dan limbah ke sungai 4. Kurangnya akses sanitasi yang layak 5. Pencemaran air yang dimungkinkan bersumber dari luar Kabupaten Purworejo	2. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat pengguna sumber air	
16	Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	9	Bupati	1. Pengendalian emisi yang masih rendah 2. Kurangnya kepatuhan industri dalam mengelola lingkungan 3. Berkurangnya Luasan tutupan vegetasi yang dapat menyerap emisi dari kendaraan bermotor dan industri berkurang	1. Menurunnya kualitas udara 2. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	Strategis/ Kebijakan
17	Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	9	Bupati	Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbangun	Degradasi/penurunan kualitas lahan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia.	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	6	Bupati	1. Kolaborasi antar pihak belum optimal 2. Sarpras belum memadai (EWS, rambu masih kurang) 3. Belum memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) 4. Kapasitas SDM masih terbatas (pemahaman masyarakat terkait EWS dan pentingnya mitigasi bencana kurang, kapasitas petugas penanganan bencana belum optimal) 5. Belum semua desa membentuk destana	Risiko bencana tinggi yang mengancam keselamatan masyarakat	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan
19	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	9	Bupati	1. Pengelolaan destinasi pariwisata kurang maksimal 2. SDM Pelaku pariwisata belum optimal 3. Aksesibilitas dan amenities belum optimal 4. Kolaborasi antar stakeholder pendukung pariwisata belum optimal	PDRB sektor akomodasi dan makan minum rendah	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	9	Bupati	1. Sarana (bibit, pupuk, sarana melaut) dan prasarana (irigasi, JUT) pertanian dan perikanan belum memadai 2. Anomali iklim/cuaca 3. Serangan hama penyakit 4. Regenerasi SDM pertanian lambat 5. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 6. Terbatasnya luas lahan perikanan 7. Sumber daya air perikanan masih terbatas karena harus menggunakan sumur 8. Keterbatasan pakan ikan	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rendah	Strategis/ Kebijakan
21	Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	9	Bupati	1. Pengolahan hasil pertanian dan perikanan kurang maksimal 2. Mayoritas Industri Berskala RumahTangga/SkalaKecil 3. Infrastruktur Pendukung Terbatas	Laju pertumbuhan ekonomi rendah	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	12	Bupati	1. Iklim investasi belum kondusif 2. Infrastruktur belum memadai 3. Daya saing harga	Pertumbuhan ekonomi rendah	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan
23	Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	9	Bupati	1. Kreativitas dan permodalan pelaku usaha kurang memadai 2. Jiwa kewirausahaan masyarakat masih rendah 3. Tata kelola UMKM belum optimal	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor rendah	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan
24	Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	12	Bupati	Berkurangnya dana transfer, rendahnya PAD, Pengelolaan anggaran kurang efisien	Pertumbuhan ekonomi rendah	Strategis/ Kebijakan
25	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	9	Bupati	1. Skill tenaga kerja kurang bersaing 2. Akses lapangan kerja dan berusaha terbatas	Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi	Strategis/ Kebijakan
26	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	9	Bupati	1. Faktor kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dan memastikan pangan yang baik bagi keluarga 2. Kurangnya keamanan pangan 3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya	Ketercukupan gizi masyarakat rendah	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 4. Berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji		
27	Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	6	Bupati	Produksi pertanian dan perikanan menurun	Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi	Strategis/ Kebijakan
28	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	6	Bupati	1. Kurangnya akses ekonomi 2. Kurangnya akses fisik 3. Adanya bencana alam	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan
29	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	9	Bupati	1. Pedoman perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang optimal 2. Pengelolaan risiko belum efektif diimplementasikan dalam pencapaian tujuan 3. Sistem manajemen kinerja belum sepenuhnya terintegrasi	Nilai SAKIP kurang maksimal	Strategis/ Kebijakan
30	Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	9	Bupati	Rumusan dan target kinerja Perangkat Daerah kurang efektif	Pemborosan anggaran	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	9	Bupati	1. Keterbatasan personil APIP 2. Hasil evaluasi belum mampu memberikan rekomendasi 3. Belum terdapat mekanisme money yang baku untuk memantau hasil evaluasi AKIP	Nilai SAKIP kurang maksimal	Strategis/ Kebijakan
32	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	9	Bupati	1. Belum memiliki Tim Koordinasi SPBE yang berfungsi optimal 2. Penerapan kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan belum sesuai dengan praktik terbaik 3. Belum melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan 4. Pengelolaan inovasi proses bisnis SPBE belum optimal	Kinerja pemerintahan kurang efisien	Strategis/ Kebijakan dan Kemitraan
33	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	9	Bupati	1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap implementasi sistem merit	1. - kepercayaan masyarakat terhadap sistem merit rendah	Strategis/ Kebijakan



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Pemahaman pegawai memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 3. Sistem informasi kepegawaian memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 4. Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 5. Faktor politik memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit	- kinerja ASN tidak optimal	
34	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	6	Bupati	1. Integritas ASN kurang 2. Budaya inovasinya masih rendah	Pelayanan kurang maksimal	Strategis/ Kebijakan
35	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	6	Bupati	1. Ego sektoral/mekanisme kerja belum berbasis jejaring 2. Belum optimalnya sakip dan MR 3. Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja belum optimal	Kinerja organisasi kurang maksimal	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Penggunaan aset dan anggaran belum efisien		
36	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	6	Bupati	1. Kebijakan Pelayanan perlu di evaluasi 2. Kapasitas SDM? (Profesionalitas SDM masih kurang) 3. Sarpras pelayanan belum memadai 4. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik kurang optimal 5. Kanal konsultasi dan pengaduan perlu disosialisasikan 6. Inovasi pelayanan publik belum optimal 7. Digitalisasi arsip belum optimal	Kepuasan masyarakat rendah	Strategis/ Kebijakan
37	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	6	Bupati	1. Belum adanya roadmap RB 2025-2029 2. Belum adanya renaksi RB tematik	Pelayanan kurang maksimal	Strategis/ Kebijakan
38	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	9	Bupati	1. Masih terdapat sasaran program yang belum berorientasi hasil 2. Masih terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak tepat untuk mengukur capaian sasaran strategis	Tujuan/ sasaran daerah tidak tercapai	Strategis/ Kebijakan



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Kebijakan Penegakan Integritas dan etika, kebijakan standar kompetensi, Kebijakan Manajemen Risiko, kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM, kebijakan kerja sama (kemitraan), sistem pengaduan yang ada belum dilakukan evaluasi 4. Masih terdapat target Indikator Sastra perangkat daerah dan indikator program yang belum dapat menggambarkan pencapaian sasaran, antara lain pada sasaran strategis perangkat daerah 5. Seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja belum mempertimbangkan risiko 6. Pengendalian yang ada belum diarahkan untuk memitigasi risiko		

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					7. Kebijakan terkait risiko kemitraan belum menyatu dalam proses perencanaan kegiatan kemitraan 8. Pimpinan telah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan namun belum seluruh kegiatan dilakukan manajemen risiko 9. Masih terdapat temuan BPK RI terkait permasalahan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan, pajak dan retribusi, kelemahan pengendalian atas penatausahaan keuangan serta dalam pemanfaatan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah 10. Masih terdapat catatan terkait aset yaitu masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah dalam		

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					Peraturan Daerah yang telah ditetapkan		
39	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	9	Bupati	Implemetasi digitalisasi arsip pada aplikasi SRIKANDI pada perangkat daerah masih sebatas pada arsip/surat masuk saja belum sampai arsip/surat keluar sehingga informasi yang diberkaskan sampai disajikan belum lengkap	Pengelolaan arsip kurang efisien	Strategis/ Kebijakan
40	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40	9	Bupati	Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam dokumen kebijakan tata kelola data dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 192 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Penerapan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Purworejo diperkuat dengan tersedianya dokumen kebijakan SK Bupati	Kebijakan perencanaan pembangunan tidak berbasis data	Strategis/ Kebijakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
					Purworejo Nomor 160.18/112/2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Data Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo Tahun 2023.		
41	Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	9	Bupati	Penyusunan kebijakan belum melibatkan semua stakeholder terkait	Kepercayaan masyarakat rendah	Strategis/ Kebijakan
42	Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	6	Bupati	Rumusan indikator kinerja kurang SMART dan kurang menggambarkan sebab akibat dengan jelas	Kinerja tidak dapat diukur dengan maksimal	Strategis/ Kebijakan dan Fraud
43	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran	RSP.25.35.01.43	8	Bupati	Komitmen pimpinan kurang	Penyalahgunaan wewenang	Fraud
44	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	8	Bupati	Pemangku kepentingan kurang profesional	Kepercayaan masyarakat rendah	Fraud

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
45	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	6	Bupati	Aparatur kurang profesional	Kepercayaan masyarakat rendah	Fraud
46	Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	6	Bupati	Akses pemeriksaan terbatas	Pengawasan internal kurang maksimal	Fraud
47	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	8	Bupati	Pemangku kepentingan kurang profesional	Tata kelola birokrasi kurang maksimal	Fraud

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengendalian risiko dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru, perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Pengendalian yang sudah ada serta pengendalian yang masih dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5. 1 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manusia

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah	RSP.25.01.01.01	- Penjaringan ATS untuk kembali ke sekolah melalui SPNF - Perbup 52 tahun 2024 - Kajian keagamaan non formal dari Kemenag - Adanya Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) pada 2 pondok pesantren di Purworejo (semacam PKBM tetapi di pondok pesantren)	- Belum ada kerjasama dengan Kementerian Agama maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan PKBM di lingkungan masyarakat dan di pondok pesantren salaf - Masyarakat beranggapan bahwa ijazah dari PKBM tidak sama dengan sekolah formal - Belum ada kebijakan dari Kemenag untuk menyelenggarakan	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Bupati	Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				PKPPS di pondok-pondok pesantren			
					Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaraan PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi pada forum-forum	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang sudah ada di Masyarakat		
2	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	1. Perbup No 144 Tahun 2022 tentang Penuntasan Pendidikan Dasar 2. Replikasi Gerakan Ayo Kembali Bersekolah 3. Kebijakan terkait penanganan Kemiskinan Ekstrem yang di dalamnya mencakup penanganan ATS 4. SE Juknis Penggunaan Dana	- Kebijakan yang ada belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi - Belum dirumuskan strategi penanganan yang efektif, pemetaan tanggung jawab antar pihak terkait, serta mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan terkait dengan penanganan ATS - Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan SE Juknis	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Bupati	Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Desa untuk intervensi penanganan ATS (termasuk dalam aspek kemiskinan) 5. Perpustakaan berbasis inklusi masyarakat, termasuk di dalamnya pelatihan, peningkatan kreativitas, dan pengetahuan kepada masyarakat dan anak usia sekolah	Penggunaan Dana Desa untuk penanganan ATS			
					Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	Bupati	Tahun 2026
3	Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	1. Perbup No 144 Tahun 2022 tentang Penuntasan Pendidikan Dasar 2. Replikasi Gerakan Ayo Kembali Bersekolah 3. Kebijakan terkait penanganan Kemiskinan Ekstrem yang di dalamnya mencakup penanganan ATS	- Kebijakan yang ada belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi - Belum dirumuskan strategi penanganan yang efektif, pemetaan tanggung jawab antar pihak terkait, serta mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan terkait dengan penanganan ATS - Pemerintah Desa belum	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	Bupati	Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. SE Juknis Penggunaan Dana Desa untuk intervensi penanganan ATS (termasuk dalam aspek kemiskinan) 5. Perpustakaan berbasis inklusi masyarakat, termasuk di dalamnya pelatihan, peningkatan kreativitas, dan pengetahuan kepada masyarakat dan anak usia sekolah	optimal dalam pelaksanaan SE Juknis Penggunaan Dana Desa untuk penanganan ATS			
					Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Anak Beriman dan Berkepribadian		
4	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	1. Peraturan Bupati Purworejo No. 32 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan SPM Kabupaten Purworejo 2. Peraturan Bupati Purworejo No. 74 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2024 - 2028	Rencana aksi SPM hanya sampai tahun 2026	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	Bupati	Tahun 2026
			- Cek Kesehatan Gratis (CKG) - Layanan CKG dengan metode jemput bola terutama pada lansia	CKG belum optimal (belum ada 25%) karena belum menyentuh semua penduduk	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan disabilitas yang tidak mampu menuju fasyankes - Draft SE Bupati tentang CKG				
			- Layanan Posyandu (balita, remaja, lansia) hingga desa		Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Bupati	Tahun 2025
5	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	Perbup 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan PHBS	- Pelaksanaan Perbup belum optimal karena belum ada Renaksi dan Tim Pelaksana PHBS - Belum ada Perbup tentang STBM	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Bupati	Tahun 2026-2027



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bupati	Tahun 2026
6	Kolaborasi dalam penanganan PHBS	RSP.25.02.01.06	Perbup 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan PHBS	- Pelaksanaan Perbup belum optimal karena belum ada Renaksi dan Tim Pelaksana PHBS	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman	Bupati	Tahun 2026-2027

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	masyarakat belum optimal			- Belum ada Perbup tentang STBM	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
					Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bupati	Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	- Memberikan Bansos (SK Bupati terkait Pemberian Hibah Bansos) - Perbup No 68 Tahun 2022 terkait Hibah Bansos, kepada KUBE, fakir miskin, LKS dan LKSA - Perbup No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup 68/2022 terkait Hibah Bansos - Bantuan kewirausahaan kepada ODHA dari Kemensos	- Masih terdapat masyarakat miskin yang belum masuk ke data sehingga belum memperoleh bantuan - Inflasi belum cukup terkendali	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			(melalui Antasena) - Kegiatan BUMDes dan BUMDesma untuk ketahanan pangan - Kegiatan Pasar Desa untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan produk unggulan, pemasaran produk lokal - Penggunaan dana desa untuk peningkatan produktivitas masyarakat				
					Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat	Bupati	Tahun 2026-2030

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa		
					Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	Bupati	Tahun 2026
					Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	Bupati	Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



Tabel 5. 2 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM Jalan)	Pelaksanaan RPIJM kurang optimal karena minimnya pendanaan	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	- Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2022-2037	Belum adanya regulasi terkait Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah	Bupati	Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)		
3	Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	- Pembangunan jamban/IPAL baik individu maupun komunal melalui DAK	Intervensi program hanya mengandalkan dari DAK	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030
					Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan Masyarakat	Bupati	Tahun 2027



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	Adanya bantuan penambahan jaringan internet untuk desa dari Pemerintah Provinsi	Belum optimalnya intervensi dari Pemerintah Kabupaten	- Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	Bupati	Tahun 2026
5	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	Pengadaan PJU, traffic light, warning light dan marka	1) Belum adanya road map jangka menengah-panjang untuk pemenuhan alat perlengkapan jalan 2) Data inventarisasi kondisi dan kebutuhan alat perlengkapan jalan (APJ) tidak diperbarui secara berkala 3) Rencana kerja tahunan tidak berbasis analisis resiko dan prioritas keselamatan	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	Bupati	Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Masih tingginya timbulan sampah yang belum terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	1) Pembangunan TPST melalui usulan sektoral 2) Pembangunan TPS3R melalui APBD Prov, APBD Kabupaten dan dana desa 3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019, sebagai pengganti dan penyempurnaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana pengolahan sampah yang sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis, yang disebabkan oleh perencanaan berbasis data timbulan dan karakteristik sampah yang belum maksimal, keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan, lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan,	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Bupati	Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				serta minimnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pengolahan sampah.			
7	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	Pendataan dan identifikasi RTLH berbasis desa/kelurahan secara berkala	1) Pendataan RTLH belum akurat dan terbaru 2) Perencanaan program perbaikan RTLH belum berbasis prioritas 3) Keterbatasan anggaran untuk penanganan dibandingkan dengan kebutuhan 4) Belum optimalnya peran Pokja PKP dan Forum PKP	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2026-2030
					Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	Bupati	Tahun 2026-2030

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



Tabel 5. 3 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	- Perda nomor 8 tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2021-2051	- Pedoman pelaksanaan Perda PPLH belum disusun - SK Peta Jalan masih baru, belum ada tim implementasinya	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bupati	Tahun 2026 - 2027
2	Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	- Perda nomor 14 tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Bupati	Tahun 2026
3	Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	- Perda nomor 5 tahun 2012, dirubah dengan		Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman	Bupati	Tahun 2026-2027

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perda nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah - Perda nomor 10 tahun 2021 tentang RTRW - SK Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
					Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan	Bupati	Tahun 2027



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)		
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bupati	Tahun 2026
					Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD	Bupati	Tahun 2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokir baru)		
4	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	- Perbup Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 - SE Bupati tentang Juknis dana desa (penggunaan dana desa untuk pembentukan destana) - Dokumen rencana kontijensi bencana - Terdapat Forum	- Dokumen perlu diperbarui menyesuaikan dengan kajian risiko bencana terbaru - Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kebencanaan sesuai hasil kajian terbaru - Rencana kontijensi bencana baru dalam	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	Bupati	Tahun 2027

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	bentuk dokumen, belum dalam bentuk produk hukum, belum berdasarkan RPKB, serta belum semua jenis bencana memiliki dokumen kontijensi. - FPRB baru ada pada tingkat Kabupaten			

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



Tabel 5. 4 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	- Sudah ada Perda tentang RIPDA 2013-2028 - Program Unggulan Dolan Purworejo pada RPJMD periode sebelumnya - Kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan amenities (kegiatan pemasaran dan	- Pembenahan daya tarik dan manajemen destinasi pariwisata - Belum ada MoU paket wisata dengan kab/kota sekitar - Paket wisata religi tidak berjalan dengan optimal	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	Bupati	Tahun 2026 Tahun 2026 Tahun 2026-2030 Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			promosi bersama dengan BOB) - Pelatihan SDM Pariwisata - Juknis dana desa untuk pengembangan pariwisata - Kerjasama dengan biro wisata - Penyusunan paket wisata religi dari provinsi - Kalender event pariwisata yang dioptimalkan dengan proses kurasi		Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044		Tahun 2027-2028



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	- Perda LP2B - SE Bupati tentang larangan alih fungsi lahan pada lokasi pembangunan prasarana pertanian - Hibah sarpras pertanian - Program Petani Milenial - Pengadaan obat untuk ternak, perkebunan, dan tanaman pangan untuk mengatasi serangan hama penyakit - Sekolah Lapang Iklim	- Belum optimalnya pelaksanaan program Petani Milenial - Belum terintegrasinya jaringan irigasi - Belum ada DED Kawasan Budidaya Udang dan Tambak Garam	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres Percepatan Penanganan Irigasi Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	Bupati Bupati Bupati	Tahun 2026 Tahun 2026-2029 Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			pada kelompok tani (pendampingan sejak awal bertanam, pengendalian pasca panen) setiap tahun - Pengusulan hibah sarpras perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan - Sertifikasi kecakapan nelayan dari Kementerian - Kolaborasi peningkatan kapasitas nelayan dengan pelatihan rancang bangun penangkapan				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			ikan dengan narsum dari Balai Penelitian dan Penangkapan Ikan (BPPI) dan KKP - Pendampingan proses budidaya ikan oleh DLHP dan Penyuluh - Penyediaan obat ikan - Pengambilan sample ikan dan air untuk uji penyakit dan uji residu ke Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Provinsi Jateng - Optimalisasi lahan yang ada dengan				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			peningkatan teknologi budidaya ikan melalui sosialisasi - Masterplan tentang Kawasan Budidaya Udang dan Tambak Garam				
3	Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	- Usulan hibah pembangunan pabrik es dan gudang beku kepada KKP untuk menyimpan hasil perikanan	Kebijakan pengembangan industri pengolahan belum jelas	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	2025-2029



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bupati	Tahun 2026
4	Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	- Perbup tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi (tanggal?)	- Belum ada kajian dan Perbup RUPM - Belum ada dokumen IPRO (katalog investasi)	Menyusun Perbup RUPM	Bupati	Tahun 2026
					Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bupati	Tahun 2026
					Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas Investasi	Bupati	2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	- SK Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah - Sudah ada kolaborasi pentahelix untuk optimalisasi fungsi PLUT	- Belum ada roadmap peran dan fungsi PLUT - PKS belum disahkan	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Percepatan akses keuangan daerah	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Optimalisasi Peran PLUT	Bupati	Tahun 2026
					Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	Koordinasi optimalisasi dana CSR	Sinkronisasi kebijakan pemanfaatan sumber dana alternatif belum ada	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030
					Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2026-2030
					Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah	Bupati	Tahun 2027

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	- Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah 2022-2027 - Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah	- Dokumen baru sampai tahun 2027 - Belum ada Roadmap/ Rencana Pelatihan Tenaga Kerja - Pelatihan belum berdasarkan kebutuhan dunia kerja - FKLP tidak aktif	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	Bupati	Tahun 2028
					Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	Bupati	Tahun 2026
8	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan	RSP.25.09.01.26	1. Sosialisasi Gerakan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum memiliki peta/ rencana yang jelas	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	beragam dan bergizi belum optimal		di sekolah, PKK maupun posyandu 2. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 3. Sinergi produk poklasar (kelompok pengolah dan pemasar ikan) dengan program pemberian makanan tambahan lokal 4. Perda 20/2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan 5.				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	sama dengan produksi pertanian - Juknis dana desa untuk ketahanan pangan - cadangan pangan	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum memiliki peta/ rencana yang jelas	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	Bupati	Tahun 2026
10	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	penyusunan dokumen FSVA	Dokumen yang ada belum cukup detail serta belum ada tim	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis	Bupati	Tahun 2026-2029
					SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	Bupati	Tahun 2026-2029
					Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					(CPPD) untuk stabilisasi harga pangan		

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



Tabel 5. 5 Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, Serta Wilayah Yang Kondusif

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017	Pedoman perlu di sesuaikan pengoptimalan sistem manajemen kinerja	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	Bupati	Tahun 2027
2	Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	- Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.0.6.3/217/2025	Perubahan indikator dan formula perhitungan target kinerja PD	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025				
					Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Bupati	Tahun 2026-2029
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	Memaksimalkan personil yang ada	- Pengusulan pemenuhan kebutuhan formasi APIP - pembentukan tim evaluator lintas PD - Korin/atensi blm kepada semua OPD	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	Bupati	Tahun 2026
					Peyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Bupati	Tahun 2026-2030



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	Bupati	Tahun 2026-2030
					Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	Bupati	Tahun 2026-2030
4	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	- pengelolaan inovasi proses bisnis SPBE - Membentuk dan mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi SPBE sebagai penggerak utama penerapan SPBE - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta	- Belum memiliki peta rencana/ roadmap SPBE - Belum ada program kerja tim - belum menerapkannya manajemen pengetahuan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan - Kompetensi SDM SPBE	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	Bupati	Tahun 2026



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			mengadopsi manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan yang sesuai dengan standar nasional. - Melaksanakan audit aplikasi SPBE untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan meningkatkan kualitas layanan. - Perbup No 23 tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	belum terpenuhi seluruhnya			

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/313/2024 tentang Pembentukan tim koordinasi SPBE - Kompetensi SDM untuk kompetensi keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. - SK Bupati Purworejo nomor 100.3.3.2/222/2025 tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi				



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Bupati	
					Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	Bupati	Tahun 2026-2029
5	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit	RSP.25.38.01.33	- Perbup nomor 112 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta - Perbup nomor 67	- Perbup Manajemen Talenta sudah kurang sesuai instrumennya - Panduan tentang	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sistem Belum Optimal		tahun 2022 tentang Mutasi ASN - Perbup nomor 198 tahun 2021 tentang pola karir - SE Bupati tentang Pengembangan Kompetensi - Perbup tentang Penghargaan PNS Berprestasi	pengembangan kompetensi baru sebatas SE dan substansinya belum optimal			
					Revisi Perbup Manajemen Talenta	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup Corpu	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	Bupati	Tahun 2025
6	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	- Perbup nomor 50 tahun 2016 tentang pengelolaan benturan kepentingan - kebijakan tata kelola pengadaan - kebijakan untuk peningkatan inovasi dalam bentuk Perbup 89 tahun 2024 tentang TPP - Perbup nomor 36	- Perbup Budaya Kerja belum mencakup tentang ASN Berakhlak - Perbup kode etik UKPBJ sudah tidak relevan	Revisi Perbup Budaya Kerja	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			tahun 2014 Budaya Kerja ASN - Perbup 46 tahun 2017 tentang pelayanan publik - Perbup tentang kode etik ASN - Perbup tahun 2018 tentang kode etik UKPBJ				
					Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	Bupati	Tahun 2026
					SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	Bupati	Tahun 2026
7	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	- kebijakan pembentukan tim kerja - Perbup nomor 116 tahun 2022 tentang Pengelolaan risiko - SE arah kebijakan 5 tahun dan tahunan - Penggunaan aplikasi sawiji - Perbup 114 tahun 2023 tentang Sistem kerja dan sudah	- implementasi tim kerja belum optimal - belum ada evaluasi tim kerja - dokumen MR disusun setelah penyusunan dokumen perencanaan selesai, sehingga RTP yang disusun belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan - aplikasi sawiji masih	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			diimplementasikan dengan pembentukan tim kerja	sebatas pada evaluasi dan kinerja fisik /kinerja PD belum digunakan atau terintegrasi dengan kinerja individu			
					SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Bupati	Tahun 2025
					Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	- SOP pelayanan - Perbup 46 tahun 2017 - Perbup 12 tahun 2025	- Belum terdapat pedoman yang jelas terkait rencana aksi pelayanan publik - Sosialisasi belum maksimal	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	Tahun 2025-2029
					Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	Bupati	Tahun 2026
9	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	Memaksimalkan kinerja Perangkat Daerah	Belum ada pedoman dan rencana aksi di tingkat daerah	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	2025-2029
					Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029		Tahun 2026
					SK Bupati tentang pembentukan tim RB		Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	Perbup nomor 116 tahun 2022 tentang pengelolaan risiko	- Perbup pengelolaan risiko perlu di sesuaikan - Penatausahaan BMD belum maksimal - Penjenjangan kinerja belum cukup jelas - Budaya pengelolaan risiko masih rendah	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Bupati	Tahun 2025
					SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Bupati	Tahun 2025
					Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	Bupati	Tahun 2025
					Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	Bupati	Tahun 2025
11	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	Perbup nomor 12 tahun 2025 tentang aplikasi srikandi	Perbup masih baru, perlu dikawal implementasinya	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	Bupati	Tahun 2026
12	Penyelenggara n pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40			Revisi Perbup satu data	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data		Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	SE Bupati terkait mekanisme penerbitan produk hukum 2024	Substansinya belum jelas mengarah ke keterlibatan stakeholder eksternal	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	Bupati	Tahun 2025
14	Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	- Perda RPJMD - Perbup Renstra - Perjanjian Kinerja - SK Metadata	Dokumen eksisting belum menggambarkan penjenjangan kinerja yang jelas	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Bupati	Tahun 2025
15	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses	RSP.25.35.01.43	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	Kesepakatan perlu dipertegas lagi isinya	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	Bupati	Tahun 2026-2030



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengesahan anggaran						
16	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	Perbup tentang Kode Etik UKPBJ	Perbup perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2025
17	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	- Memaksimalkan personil yang ada	Akses audit internal terbatas	Penyusunan Piagam Audit Internal	Bupati	Tahun 2025



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Perda sudah terlalu lama - Pedoman pengelolaan BMD belum ada	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	Bupati	Tahun 2026
					Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	Bupati	Tahun 2026-2029
19	Penyuapan/gratifikasi/pemerasaan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan	RSP.25.37.01.49	- Perbup No. 54 Th 2024 - Juklak Pemungutan Pajak Daerah - PERBUP 83 TAHUN 2024 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	SOP tentang pemungutan retribusi dan opsen belum ada	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	Bupati	Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	pajak/retribusi maupun penagihan piutang		- PERBUP 60 TAHUN 2024 tentang Retribusi Jasa Umum - Perbup 90 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Usaha - SK Bupati - SOP Pemungutan Pajak Daerah (Pengawasan Pajak Daerah) - Perbup Pwr No. 1 Th 2025 - Opsen Pajak MBLB - SK Peta Jalan (Road Map) ETPD Kab. Purworejo Tahun 2021-2025				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	Bupati	Tahun 2025
					SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan pemungutan Retribusi Daerah	Bupati	Tahun 2025
1	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017	Pedoman perlu di sesuaikan pengoptimalan sistem manajemen kinerja	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	Bupati	Tahun 2027

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Berikut disajikan informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.

Tabel 6. 1 Rencana Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
I	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manusia				
1	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Penyampaian surat	Dindikbud	Kemenag	Triwulan IV 2025
2	Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaraan PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	- Penyampaian surat - Rapat Koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Forum PKBM	Dindikbud	- PKBM - Dewan Pendidikan - Masyarakat	Triwulan I 2026
3	Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya	- Surat Edaran - Sosialisasi	Dindikbud	- Pemerintah Desa - Organisasi - Lembaga	Triwulan I 2026



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan Tinggi pada forum-forum yang sudah ada di Masyarakat			Kemasyarakatan Desa (LKD) - Masyarakat	
4	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	- Penyampaian surat - Sosialisasi	Bapperida	- Perangkat Daerah - Organisasi terkait - Masyarakat	Triwulan IV
5	Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	- Sosialisasi - Penyampaian surat	Dindikbud	- Satuan Pendidikan	Triwulan II 2026
6	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	- Pembahasan Raperbup	Bag. Pemerintahan	- Tim pembahas - Instansi terkait SPM	Triwulan III 2026
7	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	- Penyampaian surat - Sosialisasi	Dinkesda	- Pemerintah Desa - Organisasi - Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) - Masyarakat	Penyusunan Draf SE : Agustus Pembahasan SE : September Penetapan SE ; Oktober
8	Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Rapat Pembahasan Perbup	Dinkesda	Tim Pembahas	Fasilitasi Perbup : Oktober Harmonisasi Perbup : November Penetapan Perbup : Desember
9	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkesda	- Instansi terkait - Lembaga Pendidikan	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				- Fasilitas Kesehatan - Pelaku usaha terkait - Masyarakat	2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
10	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	- Rapat pembahasan SK	Dinkesda	- Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	- Triwulan II 2027
11	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	- Surat permohonan personil tim pelaksana dan pemantauan - Rapat-rapat koordinasi tim	Dinkesda	- Instansi terkait - Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	- Triwulan II 2027
12	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	- Rapat pembahasan SK	Dinkesda	- Tim Pelaksana dan Pemantauan STBM	- Triwulan II 2026
13	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	- Penyampaian surat - Sosialisasi	Dinsosdalduk kb	- Pemerintah Desa - Instansi terkait	Triwulan IV 2025
14	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang	- Penyampaian surat - Sosialisasi	DPPPAPMD	- Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa				
15	Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	- Surat Keputusan	- DKUKMP - Dinsosdalduk kb - Instansi terkait hibah dan bansos	- Instansi terkait	Triwulan II 2026
16	Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	Dokumentasi	Bag. Perekonomian	- Instansi terkait	Setiap mendekati hari besar keagamaan
II	Sasaran Strategis Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah				
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	- Sosialisasi	DPPPAPMD	- Camat - Masyarakat - Pemerintah Desa - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun
2	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	- Sosialisasi	Bapperida	- Instansi terkait	Setiap tahun
3	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	- Sosialisasi	DPUPR	- Instansi terkait	Triwulan II 2027
4	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi	- Sosialisasi - Koordinasi	DPUPR	- Perangkat Daerah - Pemerintah	Triwulan IV 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)			Desa - Masyarakat	
5	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan Masyarakat	- Sosialisasi	DPUPR	- Perangkat Daerah - Pemerintah Desa - Masyarakat	Triwulan IV 2027
6	Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	- Sosialisasi	Dinkominfo asandi	- Instansi terkait	Triwulan IV Tahun 2026
7	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	- Rapat koordinasi	Dinhub	- Instansi terkait	Triwulan IV 2026
8	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	- Rapat pembahasan/ penyusunan	DLHP	- Satgas penuntasan sampah - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan III dan IV 2026
9	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	- Rapat koordinasi	Bapperida	- Pengusaha - Instansi terkait	Triwulan II setiap tahun
10	Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	- Rapat koordinasi	Bag. Kesra	- Baznas - Perangkat Daerah terkait	Minimal 2x dalam setahun
III	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana				

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkesda	- Instansi terkait - Pelaku usaha terkait - Masyarakat	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
2	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	- Rapat pembahasan/ penyusunan	Dinkesda	- Satgas penuntasan sampah - Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan II 2027
3	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	- Surat permohonan personil - Rapat pembahasan	Dinkesda	- Satgas penuntasan sampah - Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan II 2027
4	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkesda	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait - Pemerintah	- Triwulan II 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				Desa - Masyarakat	
5	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	DLHP	- Instansi terkait - Lembaga Pendidikan - Fasilitas Kesehatan - Pelaku usaha terkait - Masyarakat	Triwulan III dan IV 2026
6	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Rapat pembahasan SK	DLHP	- Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
7	Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	- Surat permohonan personil tim pelaksana dan pemantauan - Rapat-rapat koordinasi tim	DLHP	- Instansi terkait - Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	Triwulan IV 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
8	Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	- Rapat pembahasan SK	DPUPR	- Tim Pelaksana dan Pemantauan STBM	- Triwulan II 2026 : Persiapan - Triwulan II dan III 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan IV 2026 : Penetapan dan Sosialisasi
9	Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokir baru)	- Rapat koordinasi	Bapperida	- Tim penyusun RKPD - Instansi terkait - Anggota DPRD	- Triwulan I
10	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	- Rapat-rapat penyusunan - Sosialisasi	BPBD	- Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan I : Penyusunan dokumen - Triwulan II : Sosialisasi
11	Menyusun SK Bupati tentang rencana kontingensi bencana	- Rapat pembahasan - Sosialisasi	BPBD	- Masyarakat - Instansi terkait	- Tahun 2025 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2026 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang - Tahun 2027 : Renkon Kekeringan dan KLB - Tahun 2028 :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
					Renkon Karhutla dan Longsor - Tahun 2029 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2030 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang
12	Menyusun SE Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kecamatan dan desa guna meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana	- Sosialisasi	BPBD	- Kecamatan - Pemerintah Desa	Triwulan IV 2025
13	Menyusun SE bupati terkait pembentukan sekolah tangguh bencana	- Sosialisasi	BPBD	- Satuan Pendidikan kewenangan Kabupaten - Satuan Pendidikan Non Formal - Instansi terkait	Triwulan IV 2025
14	Menyusun SE bupati terkait pembentukan Desa Tangguh bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)	- Sosialisasi	BPBD	- Kecamatan - Pemerintah Desa - Instansi terkait - Masyarakat	Triwulan IV 2025
15	Menyusun SK Bupati tentang rencana aksi penanggulangan bencana	- Rapat pembahasan/ koordinasi	BPBD	- Kecamatan - Pemerintah Desa - Instansi	Triwulan IV 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				terkait - Masyarakat - Satuan Pendidikan	
16	Menyusun SE Bupati tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kampung iklim	- Rapat pembahasan/ koordinasi - Pendampingan	DLHP	- Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan II 2026
IV	Sasaran Strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DPPPAPMD	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun
2	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	- Rapat koordinasi	Bapperida	- Pengusaha - Instansi terkait	Triwulan II setiap tahun
3	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan IV
4	Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Perekonomian	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan IV

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
5	Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Pemerintahan	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Sesuai kebutuhan
6	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	- Aplikasi SIPURI	Dinporapar	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan I Identifikasi kebijakan dan FGD lintas sektoral tentang pengembangan pariwisata - Triwulan II dan III Draft dan pembahasan - Triwulan IV Pentapan SK
7	Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinporapar	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Tahun 2027 Naskah Akademik Tahun 2028 Penetapan Perda
8	Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres Percepatan Penanganan Irigasi	- Penyampaian surat	DPUPR	- Pemerintah Pusat - Instansi terkait	Setiap tahun
9	Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV Tahun 2026
10	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Instansi terkait - Perangkat	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				Daerah terkait	triwulan I (2027-2029)
11	Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinperintrans naker	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV
12	Menyusun Perbup RUPM	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DINPMPTSP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	- Tahun 2025 (kajian RUPM) - Tahun 2026 (Perbup RUPM)
13	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan I 2026
14	Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas Investasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DINPMPTSP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV 2025
15	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Percepatan akses keuangan daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Perekonomian	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026
16	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKUKMP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026
17	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Optimalisasi Peran PLUT	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKUKMP	- Instansi terkait - Perangkat	Triwulan II 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				Daerah terkait	
18	Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Pemerintahan	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV
19	Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Tahun 2027
20	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinperintrans naker	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2028
21	Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinperintrans naker	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026
22	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Tahun 2026
23	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis (Tandatangan Bupati)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKPP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV
24	SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKPP	- Instansi terkait - Perangkat	Triwulan I tahun berikutnya

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				Daerah terkait	
25	Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk stabilisasi harga pangan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKPP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV 2026
V	Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif				
1	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)
2	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I 2026
3	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV
4	Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV
5	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah	Triwulan IV 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
				terkait - Instansi terkait	
6	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Setiap ada perubahan target
7	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II 2026
8	Peyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun
9	Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun
10	Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun
11	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinkominfo asandi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II 2026
12	Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah Kabupaten Purworejo			- Instansi terkait	
13	Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkominfo asandi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II 2026
14	Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkominfo asandi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Tahun 2026-2029
15	Revisi Perbup Manajemen Talenta	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 : sosialisasi
16	Penyusunan Perbup Corpu	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
					- Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 : sosialisasi
17	Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 : sosialisasi
18	Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
					2025 : penetapan Triwulan I 2026 : sosialisasi
19	Revisi Perbup Budaya Kerja	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III
20	Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV
21	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Barjas	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025
22	SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Barjas	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II
23	SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III
24	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
25	SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025
26	Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III
27	Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025
28	Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III tahun 2026
29	SK Bupati tentang pembentukan tim RB	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV
30	Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	Rapat koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III Tahun 2025
31	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
32	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinpusip	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2026
33	Revisi Perbup satu data	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025
34	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2026
35	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Hukum	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV setiap tahun
36	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III (Perubahan) dan IV (Murni)
37	Penyusunan Piagam Audit Internal	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV
38	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
39	Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Tahun 2026-2029
40	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025
41	SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025
42	SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan pemungutan Retribusi Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025

BAB VII PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Berikut ini disajikan tabel rencana pemantauan atas kegiatan pengendalian intern yang dibutuhkan:



Tabel 7. 1 Rencana Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
I	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manusia			
1	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan IV 2025
2	Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaraan PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan I 2026
3	Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi pada forum-forum yang sudah ada di Masyarakat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan I 2026
4	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV
5	Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan II 2026
6	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Pemerintahan	Triwulan III 2026
7	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	Penyusunan Draf SE : Agustus Pembahasan SE : September

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
				Penetapan SE ; Oktober
8	Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	Fasilitasi Perbup : Oktober Harmonisasi Perbup : November Penetapan Perbup : Desember
9	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
10	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
11	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027
12	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2026
13	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinsosdalduk kb	Triwulan IV 2025
14	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPPPAPMD	Triwulan I setiap tahun
15	Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	- DKUKMP - Dinsosdalduk kb - Instansi terkait hibah dan bansos	Triwulan II 2026
16	Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Perekonomian	Setiap mendekati hari besar keagamaan
II	Sasaran Strategis Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah			
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPPPAPMD	Triwulan I setiap tahun
2	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Setiap tahun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
3	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	Triwulan II 2027
4	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	Triwulan IV 2025
5	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan Masyarakat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	Triwulan IV 2027
6	Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfoasandi	Triwulan IV Tahun 2026
7	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinhub	Triwulan IV 2026
8	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan III dan IV 2026
9	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan II setiap tahun
10	Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Kesra	Minimal 2x dalam setahun
III	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana			
1	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
				draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
2	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027
3	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027
4	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2026
5	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan III dan IV 2026
6	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
				- Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
7	Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan IV 2025
8	Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	- Triwulan II 2026 : Persiapan - Triwulan II dan III 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan IV 2026 : Penetapan dan Sosialisasi
9	Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokir baru)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	- Triwulan I
10	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	- Triwulan I : Penyusunan dokumen - Triwulan II : Sosialisasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
11	Menyusun SK Bupati tentang rencana kontingensi bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	- Tahun 2025 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2026 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang - Tahun 2027 : Renkon Kekeringan dan KLB - Tahun 2028 : Renkon Karhutla dan Longsor - Tahun 2029 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2030 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang
12	Menyusun SE Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kecamatan dan desa guna meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025
13	Menyusun SE bupati terkait pembentukan sekolah tangguh bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
14	Menyusun SE bupati terkait pembentukan Desa Tangguh bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025
15	Menyusun SK Bupati tentang rencana aksi penanggulangan bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025
16	Menyusun SE Bupati tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kampung iklim	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan II 2026
IV	Sasaran Strategis Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif			
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPPPAPMD	Triwulan I setiap tahun
2	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan II setiap tahun
3	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV
4	Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Perekonomian	Triwulan IV
5	Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Pemerintahan	Sesuai kebutuhan
6	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinporapar	- Triwulan I Identifikasi kebijakan dan FGD lintas sektoral tentang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
				pengembangan pariwisata - Triwulan II dan III Draft dan pembahasan - Triwulan IV Pentapan SK
7	Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinporapar	Tahun 2027 Naskah Akademik Tahun 2028 Penetapan Perda
8	Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres Percepatan Penanganan Irigasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	
9	Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV Tahun 2026
10	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)
11	Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinperintrans naker	Triwulan IV
12	Menyusun Perbup RUPM	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DINPMPTSP	- Tahun 2025 (kajian RUPM) - Tahun 2026 (Perbup RUPM)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
13	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan I 2026
14	Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas Investasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DINPMPTSP	Triwulan IV 2025
15	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Percepatan akses keuangan daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Perekonomian	Triwulan II 2026
16	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKUKMP	Triwulan II 2026
17	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Optimalisasi Peran PLUT	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKUKMP	Triwulan II 2026
18	Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Pemerintahan	Triwulan IV
19	Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Tahun 2027
20	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinperintrans naker	Triwulan II 2028
21	Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinperintrans naker	Triwulan II 2026
22	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Tahun 2026
23	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis (Tandatangan Bupati)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKPP	Triwulan IV
24	SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKPP	Triwulan I tahun berikutnya
25	Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk stabilisasi harga pangan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKPP	Triwulan IV 2026



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
V	Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif			
1	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)
2	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan I 2026
3	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV
4	Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV
5	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV 2025
6	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Setiap ada perubahan target
7	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan II 2026
8	Peyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun
9	Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun
10	Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun
11	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfo asandi	Triwulan II 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
12	Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan II 2026
13	Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfoasandi	Triwulan II 2026
14	Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfoasandi	Tahun 2026-2029
15	Revisi Perbup Manajemen Talenta	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 : sosialisasi
16	Penyusunan Perbup Corpu	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
				- Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 : sosialisasi
17	Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 : sosialisasi
18	Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
				penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 : sosialisasi
19	Revisi Perbup Budaya Kerja	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan III
20	Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV
21	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Barjas	Triwulan IV 2025
22	SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Barjas	Triwulan II
23	SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan III
24	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan I
25	SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2025
26	Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan III
27	Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2025
28	Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan III tahun 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
29	SK Bupati tentang pembentukan tim RB	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV
30	Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III Tahun 2025
31	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2025
32	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinpusip	Triwulan III 2026
33	Revisi Perbup satu data	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV 2025
34	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2026
35	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Hukum	Triwulan IV setiap tahun
36	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III (Perubahan) dan IV (Murni)
37	Penyusunan Piagam Audit Internal	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan IV
38	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan IV 2026
39	Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Tahun 2026-2029
40	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III 2025
41	SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III 2025
42	SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan pemungutan Retribusi Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III 2025

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida, 2025



BAB VIII PENUTUP

Dokumen manajemen risiko ini disusun dalam rangka memberikan panduan kepada perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko urusan wajib/pilihan pemerintah daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah. Hasil penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian yang tercantum pada dokumen ini sudah melalui proses diskusi dengan melibatkan semua perangkat daerah. Oleh karena itu dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini harus menjadi acuan dalam penyusunan dan pengelolaan risiko pada level operasional.

Akhir kata, kami berharap agar pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengawal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Purworejo, 2 Oktober 2025

Bupati Purworejo



LAMPIRAN

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																																											SIMPULAN KUOSIONER CEE				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	Modus	Median		Mean			
a	b	c																																											d				
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																									4	4	3,60	Memadai				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	1	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,59	Memadai		
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,73	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,54	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,56	Memadai
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																												4	3,5	3,29	Memadai	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,46	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3,05	Memadai	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,44	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,20	Memadai			
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																												4	4	3,58	Memadai	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,41	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,46	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,46	Memadai		
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,73	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang	3	4	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,71	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,68	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,54	Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,61	Memadai	
D.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG																																												4	3	3,38	Memadai	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,44	Memadai		
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,32	Memadai		
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3,41	Memadai			
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,37	Memadai				

[illegible]

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Kabupaten Purworejo

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporgub, Web Aduan	Terdapat aduan terkait permasalahan perselingkuhan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Whatapp, Ikhtisar hasil pengawasan	Terdapat aduan terkait pungutan di sekolahan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
3	Survey SPI 2024	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, terdapat kesimpulan sebagai berikut: - Level resiko korupsi tinggi pada deskripsi Percaya akan adanya penggunaan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi pada dimensi Pengelolaan anggaran - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan melihat/ mendengar petugas menerima pemberian dalam pelaksanaan tugas pada dimensi Integritas pegawai - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan dimintai uang/ barang atau fasilitas saat berurusan dengan petugas pada dimensi Integritas pegawai	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
4	Laporgub, Web Aduan	Terdapat aduan terkait pelayanan kesehatan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
5	Laporgub, Web Aduan	Terdapat aduan terkait permasalahan BPJS	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
6	Whatsapp	Terdapat aduan terkait pelayanan kependudukan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
7	Web Aduan	Terdapat aduan terkait permasalahan DTKS	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
8	Web Aduan, Whatsapp	Terdapat aduan terkait pelayanan kantor desa	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
9	Survey SPI 2024	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengaruh pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
10	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Kelebihan Pembayaran atas Biaya Personel pada Tiga Paket Pekerjaan Konsultansi Non Konstruksi Melalui Swakelola Tipe II pada Sekretariat DPRD	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
11	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Ketidaksesuaian Spesifikasi dan Kekurangan Volume atas 10 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Peningkatan Jalan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
12	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
13	LHP BPK Nomor 48/LHP/XVIII.SMG/05/2024	Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak atas Hasil Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo) pada Dinporapar	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
14	LHP BPK Nomor 48/LHP/XVIII.SMG/05/2024	Kekurangan Volume dan Struktur Beton Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak pada Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Pituruh di Dinas	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
15	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Penagihan dan Pencatatan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Seluruhnya Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Aplikasi E-Pasar Belum Dapat Menyajikan Perhitungan Sanksi Keterlambatan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
16	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Proses Likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo Belum Selesai	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
17	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Bangun Guna Serah Belum Sesuai Ketentuan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
18	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Penatausahaan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Belum Memadai	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
19	LHP BPK Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 5 Tanggal 26 Mei 2025	Pemanfaatan Aset Tetap / Properti Investasi Belum Sepenuhnya Tertib	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
20	LHP BPK Nomor 48/LHP/XVIII.SMG/05/2024	Pengelolaan Aset Tetap Belum Sesuai Ketentuan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
21	LHP BPK Nomor 48/LHP/XVIII.SMG/05/2024	Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran untuk Biaya Pengujian pada Laboratorium Konstruksi DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
22	Laporgub, Instagram, Whatsapp, Web Aduan	Terdapat aduan terkait pelayanan Parkir	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
23	Laporgub, Whatsapp, Web Aduan	Terdapat aduan terkait LPJU	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Purworejo**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Terdapat aduan terkait permasalahan perselingkuhan Terdapat aduan terkait pungutan di sekolahan Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, terdapat kesimpulan sebagai berikut: - Level resiko korupsi tinggi pada deskripsi Percaya akan adanya penggunaan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi pada dimensi Pengelolaan anggaran - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan melihat/ mendengar petugas menerima pemberian dalam pelaksanaan tugas pada dimensi Integritas pegawai - Level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengalaman pengguna layanan dimintai uang/ barang atau fasilitas saat berurusan dengan petugas pada dimensi Integritas pegawai Terdapat aduan terkait pelayanan kesehatan Terdapat aduan terkait permasalahan BPJS Terdapat aduan terkait pelayanan kependudukan Terdapat aduan terkait permasalahan DTKS Terdapat aduan terkait pelayanan kantor desa Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran Penagihan dan Pencatatan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Seluruhnya Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Aplikasi E-Pasar Belum Dapat Menyajikan Perhitungan Sanksi Keterlambatan Proses Likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo Belum Selesai Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Bangun Guna Serah Belum Sesuai Ketentuan Penatausahaan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Belum Memadai Pemanfaatan Aset Tetap / Properti Investasi Belum Sepenuhnya Tertib (belum sesuai ketentuan) Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran untuk Biaya Pengujian pada Laboratorium Konstruksi DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan Terdapat aduan terkait pelayanan Parkir Terdapat aduan terkait LPJU	Memadai		Kurang Memadai	Meskipun hasil survei persepsi menunjukkan level Memadai, akan tetapi berdasarkan reviu terhadap dokumen-dokumen masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian internal seperti tersaji pada kolom d, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penegakan Integritas dan Nilai Etika masih Kurang Memadai.

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengaruh pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM	Memadai		Kurang Memadai	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengaruh pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Memadai		Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai		Memadai		Memadai	
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	Kurang Memadai	Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran	Memadai		Kurang Memadai	Meskipun hasil survei persepsi menunjukkan level Memadai, akan tetapi berdasarkan reviu terhadap
			Masih terdapat banyak temuan pemeriksaan hasil pekerjaan				
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Nama Dinas Terkait	Semua Perangkat Daerah
Sasaran RPJMD	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Pembangunan Manusia
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Pembangunan Manusia
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Nama Perangkat Daerah terkait	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN DAERAH DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia IKU : Indeks Pembangunan Manusia
	Kabupaten Purworejo, September 2025 Bupati Purworejo YULI HASTUTI

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Perangkat Daerah Terkait	Semua Perangkat Daerah
Sasaran RPJMD	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Infrastruktur Daerah
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Infrastruktur Daerah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Nama Perangkat Daerah terkait	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS PERHUBUNGAN
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah IKU : Indeks Infrastruktur Daerah
	Kabupaten Purworejo, September 2025 Bupati Purworejo YULI HASTUTI



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Perangkat Daerah Terkait	Semua Perangkat Daerah
Sasaran RPJMD	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Risiko Bencana
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Risiko Bencana
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Nama Perangkat Daerah terkait	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana IKU : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Risiko Bencana
	Kabupaten Purworejo, September 2025 Bupati Purworejo YULI HASTUTI

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Perangkat Daerah Terkait	Semua Perangkat Daerah
Sasaran RPJMD	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
IKU Sasaran RPJMD	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Program Penataan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Umkm Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan

Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRAS	
Nama Perangkat Daerah terkait	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Sasaran 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif IKU : Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	
		 Kabupaten Purworejo, September 2025 Bupati Purworejo YUDI HASTUTI

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
Perangkat Daerah Terkait	Semua Perangkat Daerah
Sasaran RPJMD	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas manusia Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Ketahanan Nasional
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Ketahanan Nasional
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Urusan Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSPEKTORAT DAERAH KECAMATAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NON URUSAN

Nama Perangkat Daerah terkait	Semua Perangkat Daerah	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif IKU : Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Ketahanan Nasional	
		Kabupaten Purworejo, September 2025 Bupati Purworejo  YULI HASTUTI

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif									
1	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Rata-rata lama sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.01	Bupati	Sarana prasarana pendidikan Non Formal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terbatas (kondisi eksisting ada 10 PKBM, ada kendala dalam akreditasi)	Internal	C	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Pemerataan PKBM kurang mendapatkan perhatian	Internal	C	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Eksternal	C	Derajat pendidikan masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	Bupati	Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Eksternal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Faktor sosial budaya yang masih menganggap bahwa pendidikan formal tidak penting	Eksternal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Sarana prasarana pendidikan belum merata	Internal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kualitas tenaga pendidik kurang bersaing	Internal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kurikulum kurang bersaing	Internal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	Bupati	Belum cukup dilakukan sinergi dengan instansi terkait maupun swasta	Internal, Eksternal	C	Harapan Lama Sekolah rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	Bupati	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Kesehatan	Eksternal	C	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Tidak terpantaunya sasaran yang seharusnya menerima pelayanan dasar	Eksternal	C	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Belum semua masyarakat tercover jaminan kesehatan gratis	Eksternal	C	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	Bupati	Ketersediaan rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi, tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah belum memadai	Internal, Eksternal	C	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kurangnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dari Pemerintah mengenai pentingnya PHBS	Internal, Eksternal	C	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	Bupati	Penanganan PHBS masyarakat masih parsial	Internal, Eksternal	C	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	Bupati	Pendapatan masyarakat rendah	Eksternal	C	Daya beli masyarakat rendah	Pemerintah Daerah, Masyarakat
2	Sasaran 2 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	Bupati	- Panjang jalan kewenangan kabupaten yang ditangani tidak berbanding lurus dengan kemampuan pendanaan - Penanganan infrastruktur jalan tidak berdasarkan prioritas kewenangan Kabupaten - Kurangnya intervensi kegiatan terkait penyediaan sarana dan	Internal	C	- Peningkatan biaya transportasi - Konektivitas wilayah yang terputus	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	Bupati	- Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) - Belum optimalnya sistem basis data terkait air minum - Belum optimalnya kelembagaan pengelola SPAM - Keterbatasan sumber daya air	Internal, Eksternal	C	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	Bupati	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sistem air limbah	Internal	C	- Penurunan derajat kesehatan masvarakat	Pemerintah Daerah, Masvarakat
			Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	Bupati	- Masih terdapat area blankspot	Internal	C		Pemerintah Daerah, Masvarakat
			Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	Bupati	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan belum meratanya persebaran alat kelengkapan jalan yang terpasang pada jalan kewenangan kabupaten	Internal	C	Meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih tingginya timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	Bupati	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	Internal	C	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	Bupati	Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Internal	C	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat
3	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	Bupati	Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal	Internal	C	- Menurunnya kualitas ekosistem air - Menurunnya derajat kesehatan masyarakat pengguna sumber air	Pemerintah Daerah, Masyarakat
Kurang terkendalnya penggunaan pupuk non organik	Internal									
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya membuang sampah dan limbah ke sungai	Internal									
Kurangnya akses sanitasi yang layak	Internal									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						Pencemaran air yang dimungkinkan bersumber dari luar Kabupaten Purworejo	Eksternal			
			Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	Bupati	Pengendalian emisi yang masih rendah	Internal	C	- Menurunnya kualitas ekosistem air - Menurunnya derajat kesehatan masyarakat pengguna sumber air	Pemerintah Daerah, Masyarakat
						Kurangnya kepatuhan industri dalam mengelola lingkungan	Internal			
						Berkurangnya Luasan tutupan vegetasi yang dapat menyerap emisi dari kendaraan bermotor dan industri berkurang	Internal			
			Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	Bupati	Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbangun	Internal	C	Degradasi/ penurunan kualitas lahan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia.	Pemerintah Daerah, Masyarakat
		Indeks Risiko Bencana	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	Bupati	- Kolaborasi antar pihak belum optimal - Sarpras belum memadai (EWS, rambu masih kurang) - Belum memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) - Kapasitas SDM masih terbatas (pemahaman masyarakat terkait EWS dan pentingnya mitigasi bencana kurang, kapasitas petugas penanganan bencana belum optimal) - Belum semua desa membentuk	Internal	C	Risiko bencana tinggi yang mengancam keselamatan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
4	Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	Bupati	- Pengelolaan destinasi pariwisata kurang maksimal - SDM Pelaku pariwisata belum optimal - Aksesibilitas dan amenities belum optimal - Kolaborasi antar stakeholder pendukung pariwisata belum optimal	Internal, Eksternal	C	PDRB sektor akomodasi dan makan minum rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	Bupati	- Sarana (bibit, pupuk, sarana melaut) dan prasarana (irigasi, JUT) pertanian dan perikanan belum memadai - Anomali iklim/cuaca - Serangan hama penyakit - Regenerasi SDM pertanian lambat - Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian - Terbatasnya luas lahan perikanan - Sumber daya air perikanan masih terbatas karena harus menggunakan sumur	Internal, Eksternal	C/UC	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	Bupati	Pengolahan hasil pertanian dan perikanan kurang maksimal - Mayoritas Industri Berskala RumahTangga/SkalaKecil - Infrastruktur Pendukung Terbatas	Internal, Eksternal	C/UC	Laju pertumbuhan ekonomi rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	Bupati	-Iklim investasi belum kondusif - infrastruktur belum memadai - daya saing harga	Eksternal	C	Pertumbuhan ekonomi rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	Bupati	- Kreativitas dan permodalan pelaku usaha kurang memadai - Jiwa kewirausahaan masyarakat masih rendah - Tata kelola UMKM belum optimal	Internal	C	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
			Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	Bupati	Berkurangnya dana transfer, rendahnya PAD, Pengelolaan anggaran kurang efisien	Eksternal	C/UC	Pertumbuhan ekonomi rendah	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	Bupati	Skill tenaga kerja kurang bersaing	Internal	C	Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi	Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
						Akses lapangan kerja dan berusaha terbatas	Internal/ Eksternal	C		
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	Bupati	1. Faktor kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dan memastikan pangan yang baik bagi keluarga. 2. kurangnya keamanan pangan 3. terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat	Eksternal/ Internal	UC/C	Ketercukupan gizi masyarakat rendah	
						Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Internal	C		
						Berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji	Eksternal	C		
			Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	Bupati	produksi pertanian dan perikanan menurun	Internal	C	Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi	
			Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	Bupati	1. kurangnya akses ekonomi 2. kurangnya akses fisik 3. adanya bencana alam	Internal	C/UC	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah	
5	Sasaran 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	Bupati	- Pedoman perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang optimal - pengelolaan risiko belum efektif diimplementasikan dalam pencapaian tujuan - sistem manajemen kinerja belum sepenuhnya terintegrasi	Internal	C	Nilai SAKIP kurang maksimal	Perangkat Daerah
			Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	Bupati	Rumusan dan target kinerja Perangkat Daerah kurang efektif	Internal	C	Pemborosan anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	Bupati	- Keterbatasan personil APIP - hasil evaluasi belum mampu memberikan rekomendasi - belum terdapat mekanisme monev yang baku untuk memantau hasil evaluasi AKIP	Internal	C	Nilai SAKIP kurang maksimal	Perangkat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	Bupati	- belum memiliki Tim Koordinasi SPBE yang berfungsi optimal - Penerapan kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan belum sesuai dengan praktik terbaik - belum melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan - Pengelolaan inovasi proses bisnis SPBE belum optimal	Internal	C	Kinerja pemerintahan kurang efisien	Perangkat Daerah
			Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	Bupati	1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap implementasi sistem merit 2. Pemahaman pegawai memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 3. Sistem informasi kepegawaian memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 4. Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 5. Faktor politik memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit	Internal	C	- kepercayaan masyarakat terhadap sistem merit rendah - kinerja ASN tidak optimal	Pemerintah
			Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	Bupati	- Integritas ASN kurang - budaya inovasinya masih rendah	Internal	C	Pelayanan kurang maksimal	Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	Bupati	- ego sektoral/mekanisme kerja belum berbasis jejaring - belum optimalnya saki dan MR - integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja belum optimal - penggunaan aset dan anggaran belum efisien	Internal	C	Kinerja organisasi kurang maksimal	Pemerintah
			Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	Bupati	'- Kebijakan Pelayanan perlu di evaluasi - Kapasitas SDM? (Profesionalitas SDM masih kurang) - Sarpras pelayanan belum memadai - Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik kurang optimal - kanal konsultasi dan pengaduan perlu disosialisasikan - inovasi pelayanan publik belum optimal	Internal	C	Kepuasan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah
			Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	Bupati	- belum adanya roadmap RB 2025-2029 - belum adanva renaksi RB tematik	Internal	C	Pelayanan kurang maksimal	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	Bupati	- Masih terdapat sasaran program yang belum berorientasi hasil - Masih terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak tepat untuk mengukur capaian sasaran strategis -Kebijakan Penegakan Integritas dan etika, kebijakan standar kompetensi, Kebijakan Manajemen Risiko, kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM, kebijakan kerja sama (kemitraan), sistem pengaduan yang ada belum dilakukan evaluasi - Masih terdapat target Indikator Sastra perangkat daerah dan indikator program yang belum dapat menggambarkan pencapaian sasaran, antara lain pada sasaran strategis perangkat daerah - Seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja belum mempertimbangkan risiko.	Internal	C	Tujuan/ sasaran daerah tidak tercapai	Masyarakat, Pemerintah
			Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	Bupati	Implemetasi digitalisasi arsip pada aplikasi SRIKANDI pada perangkat daerah masih sebatas pada arsip/surat masuk saja belum sampai arsip/surat keluar sehingga informasi yang diberkaskan sampai diseiikan belum lengkap	Internal	C	Pengelolaan arsip kurang efisien	Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40	Bupati	Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam dokumen kebijakan tata kelola data dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 192 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. • Penerapan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Purworejo diperkuat dengan tersedianya dokumen kebijakan SK Bupati Purworejo Nomor 160.18/112/2023 Tentang	Internal	C	Kebijakan perencanaan pembangunan tidak berbasis data	Masyarakat, Pemerintah
			Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	Bupati	Penyusunan kebijakan belum melibatkan semua stakeholder terkait	Internal	C	Kepercayaan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah
			Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	Bupati	Rumusan indikator kinerja kurang SMART dan kurang menggambarkan sebab akibat dengan jelas	Internal	C	Kinerja tidak dapat diukur dengan maksimal	Masyarakat, Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran	RSP.25.35.01.43	Bupati	Komitmen pimpinan kurang	Internal	C	Penyalahgunaan wewenang	Masyarakat, Pemerintah
			Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	Bupati	Pemangku kepentingan kurang profesional	Internal	C	Kepercayaan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah
			Membayar biaya lebih agar pelayanan dipercepat, pemerasan/pungli , birokrasi rumit, tidak responsif, kepuasan layanan rendah	RSP.25.35.01.45	Bupati	Aparatur kurang profesional	Internal	C	Kepercayaan masyarakat rendah	Masyarakat, Pemerintah
			SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	Bupati	Akses pemeriksaan terbatas	Internal	C	Pengawasan internal kurang maksimal	Pemerintah
			Penyuapan/gratifikasi/pemerasan/jual beli jabatan	RSP.25.35.01.47	Bupati	Pemangku kepentingan kurang profesional	Internal	C	Tata kelola birokrasi kurang maksimal	Masyarakat, Pemerintah
			Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	Bupati	Regulasi pengelolaan BMD belum update	Internal	C	Pengelolaan BMD kurang maksimal	Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	Bupati	Regulasi tentang pendapatan belum update	Internal	C	Pengelolaan Pendapatan kurang maksimal	Masyarakat, Pemerintah
		Indeks Ketahanan Nasional	Terjadinya konflik sosial/ SARA	RSP.25.40.01.50	Bupati	Kerukunan masyarakat kurang	Eksternal	UC/C	Iklim investasi kurang bagus	Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda

: Kabupaten Purworejo

Tahun Penilaian

: 2025

Sasaran Strategis Pemda

: Meningkatkan kualitas manusia

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Rata-rata lama sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.01	3	2	6
2	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	4	2	8
3	Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	3	2	6
4	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	3	3	9
5	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	3	3	9
6	Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	3	3	9
7	Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	3	3	9

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian	: 2025
Sasaran Strategis Pemda	: Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	3	3	9
2	Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	3	3	9
3	Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	3	3	9
4	Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	3	3	9
5	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	3	3	9
6	Masih tingginya timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	3	3	9
7	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	3	3	9

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis Pemda : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	4	3	12
2	Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	3	3	9
3	Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	3	3	9
4	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	3	2	6

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis Pemda : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	3	3	9
2	Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	3	3	9
3	Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	3	3	9
4	Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	4	3	12
5	Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	3	3	9
6	Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	4	3	12
7	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	3	3	9
8	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	3	3	9
9	Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	3	2	6
10	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	3	2	6

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis Pemda : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	3	3	9
2	Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	3	3	9
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	3	3	9
4	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	3	3	9
5	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	3	3	9
6	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	3	2	6
7	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	3	2	6
8	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	3	2	6
9	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	3	2	6
10	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	3	3	9
11	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	3	3	9
12	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40	3	3	9
13	Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	3	3	9
14	Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	3	2	6
15	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengesahan anggaran	RSP.25.35.01.43	4	2	8
16	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	4	2	8
17	Membayar biaya lebih agar pelayanan dipercepat, pemerasan/pungli, birokrasi rumit, tidak responsif, kepuasan layanan rendah	RSP.25.35.01.45	4	1	4
18	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	3	2	6
19	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan/jual beli jabatan	RSP.25.35.01.47	4	1	4
20	Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	3	2	6
21	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	4	2	8
22	Terjadinya konflik sosial/ SARA	RSP.25.40.01.50	3	1	3

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas manusia

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala	Pemilik	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Rata-rata lama sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.01	6	Bupati	Sarana prasarana pendidikan Non Formal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terbatas (kondisi eksisting ada 10 PKBM, ada kendala dalam akreditasi)	Derajat pendidikan masyarakat rendah
					Pemerataan PKBM kurang mendapatkan perhatian	Derajat pendidikan masyarakat rendah
					Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Derajat pendidikan masyarakat rendah
2	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	8	Bupati	Kemampuan ekonomi keluarga rendah	Harapan Lama Sekolah rendah
					Faktor sosial budaya yang masih menganggap bahwa pendidikan formal tidak penting	Harapan Lama Sekolah rendah
					Sarana prasarana pendidikan belum merata	Harapan Lama Sekolah rendah
					Kualitas tenaga pendidik kurang bersaing	Harapan Lama Sekolah rendah
					Kurikulum kurang bersaing	Harapan Lama Sekolah rendah
3	Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	6	Bupati	Belum cukup dilakukan sinergi dengan instansi terkait maupun swasta	Harapan Lama Sekolah rendah
4	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	9	Bupati	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
					Tidak terpantaunya sasaran yang seharusnya menerima pelayanan dasar	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
					Belum semua masyarakat tercover jaminan kesehatan gratis	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
5	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	9	Bupati	Ketersediaan rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi, tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah belum memadai	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi
					Kurangnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dari Pemerintah mengenai pentingnya PHBS	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala	Pemilik	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
6	Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	9	Bupati	Penanganan PHBS masyarakat masih parsial	Angka kejadian penyakit menular/ tidak menular tinggi
7	Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	9	Bupati	Pendapatan masyarakat rendah	Daya beli masyarakat rendah

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala	Pemilik	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	9	Bupati	- Panjang jalan kewenangan kabupaten yang ditangani tidak berbanding lurus dengan kemampuan pendanaan - Penanganan infrastruktur jalan tidak berdasarkan prioritas kewenangan Kabupaten - Kurangnya intervensi kegiatan terkait penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	- Peningkatan biaya transportasi - Konektivitas wilayah yang terputus
2	Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	9	Bupati	- Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) - Belum optimalnya sistem basis data terkait air minum - Belum optimalnya kelembagaan pengelola SPAM - Keterbatasan sumber daya air	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat
3	Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	9	Bupati	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sistem air limbah	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat
4	Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	9	Bupati	- Masih terdapat area blankspot	
5	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	9	Bupati	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan belum meratanya persebaran alat kelengkapan jalan yang terpasang pada jalan kabupaten	Meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas
6	Masih tingginya timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	9	Bupati	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat
7	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	9	Bupati	Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	- Penurunan derajat kesehatan masyarakat

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala	Pemilik	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	12	Bupati	Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal Kurang terkendalinya penggunaan pupuk non organik Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya membuang sampah dan limbah ke sungai Kurangnya akses sanitasi yang layak Pencemaran air yang dimungkinkan bersumber dari luar Kabupaten Purworejo	- Menurunnya kualitas ekosistem air - Menurunnya derajat kesehatan masyarakat pengguna sumber air
2	Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16	9	Bupati	Pengendalian emisi yang masih rendah Kurangnya kepatuhan industri dalam mengelola lingkungan Berkurangnya Luasan tutupan vegetasi yang dapat menyerap emisi dari kendaraan bermotor dan industri berkurang	- Menurunnya kualitas ekosistem air - Menurunnya derajat kesehatan masyarakat pengguna sumber air
3	Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17	9	Bupati	Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbangun	- Degradasi/penurunan kualitas lahan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia.
4	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	6	Bupati	- Kolaborasi antar pihak belum optimal - Sarpras belum memadai (EWS, rambu masih kurang) - Belum memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) - Kapasitas SDM masih terbatas (pemahaman masyarakat terkait EWS dan pentingnya mitigasi bencana kurang, kapasitas petugas penanganan bencana belum optimal) - Belum semua desa membentuk destana	Risiko bencana tinggi yang mengancam keselamatan masyarakat

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Kabupaten Purworejo				
Tahun Penilaian		: 2025				
Sasaran Strategis		: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Risiko Strategis					
1	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	9	Bupati	- Pengelolaan destinasi pariwisata kurang maksimal - SDM Pelaku pariwisata belum optimal - Aksesibilitas dan amenitas belum optimal - Kolaborasi antar stakeholder pendukung pariwisata belum optimal	PDRB sektor akomodasi dan makan minum rendah
2	Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	9	Bupati	- Sarana (bibit, pupuk, sarana melaut) dan prasarana (irigasi, JUT) pertanian dan perikanan belum memadai - Anomali iklim/cuaca - Serangan hama penyakit - Regenerasi SDM pertanian lambat - Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian - Terbatasnya luas lahan perikanan - Sumber daya air perikanan masih terbatas karena harus menggunakan sumur	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rendah
3	Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	9	Bupati	Pengolahan hasil pertanian dan perikanan kurang maksimal - Mayoritas Industri Berskala RumahTangga/SkalaKecil - Infrastruktur Pendukung Terbatas	Laju pertumbuhan ekonomi rendah
4	Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	12	Bupati	-Iklim investasi belum kondusif - infrastruktur belum memadai - daya saing harga	Pertumbuhan ekonomi rendah
5	Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	9	Bupati	- Kreativitas dan permodalan pelaku usaha kurang memadai - Jiwa kewirausahaan masyarakat masih rendah - Tata kelola UMKM belum optimal	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor rendah
6	Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	12	Bupati	Berkurangnya dana transfer, rendahnya PAD, Pengelolaan anggaran kurang efisien	Pertumbuhan ekonomi rendah
7	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	9	Bupati	Skill tenaga kerja kurang bersaing	Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi
					Akses lapangan kerja dan berusaha terbatas	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
8	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	9	Bupati	1. Faktor kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dan memastikan pangan yang baik bagi keluarga. 2. kurangnya keamanan pangan 3. terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat	Ketercukupan gizi masyarakat rendah
					Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	
					Berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji	
9	Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	6	Bupati	produksi pertanian dan perikanan menurun	Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi
10	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	6	Bupati	1. kurangnya akses ekonomi 2. kurangnya akses fisik 3. adanya bencana alam	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	9	Bupati	- Pedoman perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang optimal - pengelolaan risiko belum efektif diimplementasikan dalam pencapaian tujuan - sistem manajemen kinerja belum sepenuhnya terintegrasi	Nilai SAKIP kurang maksimal
2	Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	9	Bupati	Rumusan dan target kinerja Perangkat Daerah kurang efektif	Pemborosan anggaran
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	9	Bupati	- Keterbatasan personil APIP - hasil evaluasi belum mampu memberikan rekomendasi - belum terdapat mekanisme monev yang baku untuk memantau hasil evaluasi AKIP	Nilai SAKIP kurang maksimal
4	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	9	Bupati	- belum memiliki Tim Koordinasi SPBE yang berfungsi optimal - Penerapan kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan belum sesuai dengan praktik terbaik - belum melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan - Pengelolaan inovasi proses bisnis SPBE belum optimal	Kinerja pemerintahan kurang efisien
5	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	9	Bupati	1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap implementasi sistem merit 2. Pemahaman pegawai memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 3. Sistem informasi kepegawaian memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 4. Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit 5. Faktor politik memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem merit	- kepercayaan masyarakat terhadap sistem merit rendah - kinerja ASN tidak optimal -
6	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	6	Bupati	- Integritas ASN kurang - budaya inovasinya masih rendah	Pelayanan kurang maksimal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
7	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	6	Bupati	- ego sektoral/mekanisme kerja belum berbasis jejaring - belum optimalnya saking dan MR - integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja belum optimal - penggunaan aset dan anggaran belum efisien	Kinerja organisasi kurang maksimal
8	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	6	Bupati	- Kebijakan Pelayanan perlu di evaluasi - Kapasitas SDM? (Profesionalitas SDM masih kurang) - Sarpras pelayanan belum memadai - Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik kurang optimal - kanal konsultasi dan pengaduan perlu disosialisasikan - inovasi pelayanan publik belum optimal - Digitalisasi arsip belum optimal	Kepuasan masyarakat rendah
9	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	6	Bupati	- belum adanya roadmap RB 2025-2029 - belum adanya renaksi RB tematik	Pelayanan kurang maksimal
10	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	9	Bupati	- Masih terdapat sasaran program yang belum berorientasi hasil - Masih terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak tepat untuk mengukur capaian sasaran strategis -Kebijakan Penegakan Integritas dan etika, kebijakan standar kompetensi, Kebijakan Manajemen Risiko, kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM, kebijakan kerja sama (kemitraan), sistem pengaduan yang ada belum dilakukan evaluasi - Masih terdapat target Indikator Sastra perangkat daerah dan indikator program yang belum dapat menggambarkan pencapaian sasaran, antara lain pada sasaran strategis perangkat daerah	Tujuan/ sasaran daerah tidak tercapai

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
11	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	9	Bupati	Implemetasi digitalisasi arsip pada aplikasi SRIKANDI pada perangkat daerah masih sebatas pada arsip/surat masuk saja belum sampai arsip/surat keluar sehingga informasi yang diberkaskan sampai disajikan belum lengkap	Pengelolaan arsip kurang efisien
12	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40	9	Bupati	Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam dokumen kebijakan tata kelola data dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 192 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. • Penerapan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Purworejo diperkuat dengan tersedianya dokumen kebijakan SK Bupati Purworejo Nomor 160.18/112/2023 Tentang	Kebijakan perencanaan pembangunan tidak berbasis data
13	Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	9	Bupati	Penyusunan kebijakan belum melibatkan semua stakeholder terkait	Kepercayaan masyarakat rendah
14	Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	6	Bupati	- Intervensi/Col dalam penyusunan program/ kegiatan - Pokir tidak disampaikan secara transparan/ disampaikan di luar batas waktu yg ditetapkan - Pokir tidak selaras dengan RPJMD - Penyaluran bantuan pemerintah/hibah/bansos tidak sesuai ketentuan	Kinerja tidak dapat diukur dengan maksimal
15	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran	RSP.25.35.01.43	8	Bupati	- Standar harga penganggaran belum ada/standar sudah ada namun ditetapkan tidak sesuai standar harga wajar - Penyalahgunaan anggaran belanja honorarium dan perjalanan dinas	Penyalahgunaan wewenang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
16	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	8	Bupati	- Proyek strategis tidak ditetapkan secara memadai - Pemecahan paket pekerjaan, konsolidasi PBJ tidak optimal - Temuan hasil pemeriksaan berupa penyimpangan PBJ - Hasil PBJ tidak sesuai spek yang direncanakan - Reviu harga e-catalogue belum optimal - Pengaturan/pengkondisian e-	Kepercayaan masyarakat rendah
17	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	6	Bupati	- Jumlah aparat pengawasan belum memnuhi kebutuhan kegiatan pengawasan yang diperlukan - Kualitas hasil pengawasan belum memuaskan - Anggaran belum mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan tugas pengawasan - Independensi dan obyektivitas belum terpenuhi - Dukungan sekretariat dan sarana prasarana belum terpenuhi	Hasil pengawasan kurang berdampak pada perbaikan termasuk penajaman upaya pemberantasan korupsi
18	Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	6	Bupati	- Pencatatan BMD belum akurat - Pengamanan hukum atas aset tanah masih belum memadai (belum bersertifikat) - Proses sertifikasi aset tidak didukung anggaran yang memadai - BMD disalahgunakan Asn bukan untuk keperluan kedinasan - BMD dikuasai oleh pihak lain, termasuk pejabat yang sudah selesai menjabat - BMD dikembalikan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan - Pemanfaatan BMD tidak sesuai nilai seharusnya	Kehilangan aset, kerugian keuangan negara/ daerah
19	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	8	Bupati	- Penerimaan tidak disetorkan ke kas daerah - Pembayaran pajak/retribusi di bawah tarif yang seharusnya - Pemutakhiran data wajib pajak/retribusi dan obyek pajak/retribusi tidak maksimal - Tarif tidak dilakukan evaluasi berkala - Pengawasan kurang optimal - Penegakan aturan/snaksi	Rendahnya kepatuhan pembayaran oleh wajib pajak/retribusi, penerimaan PAD tidak sesuai potensi

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

: Kabupaten Purworejo
: 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Terdapat aduan terkait permasalahan perselingkuhan	Melakukan pembinaan secara intensif kepada ASN minimal 2 kali dalam setahun	BKPSDM	Tahun 2025
		Membuat Surat Edaran Bupati terkait pengawasan internal terhadap perilaku indisipliner	BKPSDM	Tahun 2025
2	Terdapat aduan terkait pungutan di sekolahan	Sosialisasi Perbup 52 tahun 2024 kepada wali murid dan pengurus komite	Dindikbud	Tahun 2025
3	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, terdapat kesimpulan sebagai berikut: - Level resiko korupsi tinggi pada deskripsi Percaya akan adanya penggunaan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi pada dimensi <u>Pengelolaan anggaran</u>	Membuat Surat Edaran Bupati terkait pengawasan internal Pegawai di masing-masing Perangkat Daerah	BKPSDM	Tahun 2025
		Membuat pakta integritas kepada semua ASN	Inspektorat	Tahun 2025
4	Terdapat aduan terkait pelayanan kesehatan	Mengadakan pelatihan service excelent kepada tenaga kesehatan	BKPSDM	Tahun 2025
		Monitoring ke Puskesmas tindak lanjut pelatihan service excellent pada petugas yang telah dilatih.	Dinkesda	Tahun 2025
5	Terdapat aduan terkait permasalahan klaim BPJS	Pembuatan aplikasi pendaftaran BPJS Kesehatan PBPU dan BP Pemda dan pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS	Dinkesda	Tahun 2025
6	Terdapat aduan terkait pelayanan kependudukan	Melakukan pembinaan terhadap pegawai	Dindukcapil	Tahun 2025
		Mengadakan pelatihan service excelent kepada petugas layanan	Dindukcapil	Tahun 2025
		Merevisi dan mempermudah SOP pelayanan supaya masyarakat tidak kesulitan	Dindukcapil	Tahun 2025
7	Terdapat aduan terkait permasalahan DTKS	Melakukan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan penduduk tidak mampu sesuai kondisi sebenarnya	DPPPAPMD	Tahun 2027
8	Terdapat aduan terkait pelayanan kantor desa	Melakukan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku	DPPPAPMD	Tahun 2026
9	Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran	Melakukan pembinaan secara intensif kepada semua Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengendalian secara tertib sesuai peraturan yang berlaku terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2025
10	Penagihan dan Pencatatan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Seluruhnya Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Aplikasi E-Pasar Belum Dapat Menyajikan Perhitungan Sanksi Keterlambatan	Melakukan pengembangan aplikasi E-Retribusi	DKUKMP	Tahun 2025
11	Proses Likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo Belum Selesai	Meningkatkan integritas manajemen BUMD	Bag. Perekonomian dan SDA	Tahun 2025
		Optimalisasi peran Dewan Pengawas dan Dewan Pembina	Bag. Perekonomian dan SDA	Tahun 2025
12	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Bangun Guna Serah Belum Sesuai Ketentuan	Memastikan dalam penyusunan perjanjian kerjasama harus lebih jelas hak dan kewajiban beserta konsekuensi atas pelanggaran perjanjian	DKUKMP	Tahun 2027
13	Penatausahaan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Belum Memadai	Melaksanakan sesuai SOP	BKPAD	Tahun 2025
		Melaksanakan rekonsiliasi dengan DPMPSTSP setiap triwulan	BKPAD	Tahun 2025
14	Pemanfaatan Aset Tetap / Properti Investasi Belum Sepenuhnya Tertib (belum sesuai ketentuan)	Melakukan pengalihan status tanah dan bangunan	BKPAD	Tahun 2025
15	Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran untuk Biaya Pengujian pada Laboratorium Konstruksi DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan	Mengimplementasikan Perbup nomor 63 tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi	DPUPR	Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
16	Terdapat aduan terkait pelayanan Parkir	Mengimplementasikan SOP	DPUPR	Tahun 2025
		Melakukan pembinaan kepada petugas parkir 3 kali setahun	Dinhub	Tahun 2025
		Koordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban parkir liar	Dinhub	Tahun 2025
		Implementasi layanan aduan Menduan Nyengkir	Dinhub	Tahun 2025
17	Terdapat aduan terkait LPJU	Melakukan pengusulan penambahan LPJU sesuai kewenangan jalan	Dinhub	Tahun 2025
		Melakukan pengusulan bantuan sarpras pemeliharaan PJU sesuai kewenangan jalan	Dinhub	Tahun 2025
		Mengoptimalkan pemeliharaan dan layanan aduan permasalahan PJU	Dinhub	Tahun 2025
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Berdasarkan hasil survey SPI tahun 2024, level keberadaan korupsi tinggi pada deskripsi Pengaruh pemberian pada kebijakan promosi/ mutasi pegawai pada dimensi Pengelolaan SDM	Merevisi Perbup Manajemen Talenta	BKPSDM	Tahun 2025
		Melaksanakan implementasi Perbup Manajemen Talenta	BKPSDM	Tahun 2025
III	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif			
1	Terdapat hasil pekerjaan yang kurang volume, spesifikasi tidak sesuai dan kelebihan pembayaran	Melakukan probity audit terhadap proyek strategis	Inspektorat	Tahun 2025
2	Masih terdapat banyak temuan pemeriksaan hasil pekerjaan	Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam melaksanakan consulting and assurance kepada semua Perangkat Daerah	Inspektorat	Tahun 2025

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025
 Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas manusia

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah	RSP.25.01.01.01	- Penjaringan ATS untuk kembali ke sekolah melalui SPNF - Peraturan Bupati 52 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan - Kajian keagamaan non formal dari Kemenag - Adanya Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) pada 2 pondok pesantren di Purworejo (semacam PKBM tetapi di pondok pesantren)	- Belum ada kerjasama dengan Kementerian Agama maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan PKBM di lingkungan masyarakat dan di pondok pesantren salaf - Masyarakat beranggapan bahwa ijazah dari PKBM tidak sama dengan sekolah formal - Belum ada kebijakan dari Kemenag untuk menyelenggarakan PKPPS di pondok-pondok pesantren	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Bupati	Tahun 2025
					Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaraan PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi pada forum-forum yang sudah ada di Masyarakat	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi	RSP.25.01.01.02	1. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penuntasan Pendidikan Dasar 2. Replikasi Gerakan Ayo Kembali Bersekolah 3. Kebijakan terkait penanganan Kemiskinan Ekstrem yang di dalamnya mencakup penanganan ATS 4. Surat Edaran Juknis Penggunaan Dana Desa untuk intervensi penanganan ATS (termasuk dalam aspek kemiskinan) 5. Perpustakaan berbasis inklusi masyarakat, termasuk di dalamnya	- Kebijakan yang ada belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi - Belum dirumuskan strategi penanganan yang efektif, pemetaan tanggung jawab antar pihak terkait, serta mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan terkait dengan penanganan ATS - Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan SE Juknis Penggunaan Dana Desa untuk penanganan ATS	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	Bupati	Tahun 2026
3	Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	RSP.25.01.01.03	1. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penuntasan Pendidikan Dasar 2. Replikasi Gerakan Ayo Kembali Bersekolah 3. Kebijakan terkait penanganan Kemiskinan Ekstrem yang di dalamnya mencakup penanganan ATS 4. Surat Edaran Juknis Penggunaan Dana Desa untuk intervensi penanganan ATS (termasuk dalam aspek kemiskinan) 5. Perpustakaan berbasis inklusi masyarakat, termasuk di dalamnya pelatihan, peningkatan kreativitas, dan pengetahuan kepada masyarakat dan	- Kebijakan yang ada belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi - Belum dirumuskan strategi penanganan yang efektif, pemetaan tanggung jawab antar pihak terkait, serta mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan terkait dengan penanganan ATS - Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan SE Juknis Penggunaan Dana Desa untuk penanganan ATS	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25.02.01.04	1. Peraturan Bupati Purworejo No. 32 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan SPM Kabupaten Purworejo 2. Peraturan Bupati Purworejo No. 74 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2024 - 2028	Rencana aksi SPM hanya sampai tahun 2026	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	Bupati	Tahun 2026
			- Cek Kesehatan Gratis (CKG) - Layanan CKG dengan metode jemput bola terutama pada lansia dan disabilitas yang tidak mampu menuju fasyankes - Draft Surat Edaran Bupati tentang CKG	CKG belum optimal (belum ada 25%) karena belum menyentuh semua penduduk	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	Bupati	Tahun 2025
			- Layanan Posyandu (balita, remaja, lansia) hingga desa		Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Bupati	Tahun 2025
5	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah	RSP.25.02.01.05	Peraturan Bupati 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan PHBS	- Pelaksanaan Perbup belum optimal karena belum ada Renaksi dan Tim Pelaksana PHBS - Belum ada Perbup tentang STBM	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Bupati	Tahun 2026-2027
					Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal	RSP.25.02.01.06	Peraturan Bupati 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan PHBS	- Pelaksanaan Perbup belum optimal karena belum ada Renaksi dan Tim Pelaksana PHBS - Belum ada Perbup tentang STBM	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Bupati	Tahun 2026-2027
					Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bupati	Tahun 2026
7	Pengeluaran masyarakat rendah	RSP.25.99.01.07	- Memberikan Bansos (Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Bansos) - Peraturan Bupati No 68 Tahun 2022 tentang Hibah Bansos, kepada KUBE, fakir miskin, LKS dan LKSA - Peraturan Bupati No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup 68/2022 terkait Hibah Bansos - Bantuan kewirausahaan kepada ODHA dari Kemensos (melalui Antasena) - Kegiatan BUMDes dan BUMDesma untuk ketahanan pangan - Kegiatan Pasar Desa untuk	- Masih terdapat masyarakat miskin yang belum masuk ke data sehingga belum memperoleh bantuan - Inflasi belum cukup terkendali	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030
					Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			pemberdayaan masyarakat, peningkatan produk unggulan, pemasaran produk lokal - Penggunaan dana desa untuk		Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	Bupati	Tahun 2025- 2029

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	RSP.25.03.01.08	Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM Jalan)	Pelaksanaan RPIJM kurang optimal karena minimnya pendanaan	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Masih rendahnya akses air minum aman	RSP.25.03.01.09	- Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2022-2037	Belum adanya regulasi terkait Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	Bupati	Tahun 2025
3	Masih rendahnya akses sanitasi aman	RSP.25.03.01.10	- Pembangunan jamban/IPAL baik individu maupun komunal melalui DAK	Intervensi program hanya mengandalkan dari DAK	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030
					Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan Masyarakat	Bupati	Tahun 2027
4	Akses pengguna internet masih rendah	RSP.25.16.01.11	Adanya bantuan penambahan jaringan internet untuk desa dari Pemerintah Provinsi	Belum optimalnya intervensi dari Pemerintah Kabupaten	- Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	RSP.25.03.01.12	Pengadaan PJU, traffic light, warning light dan marka	1) Belum adanya road map jangka menengah-panjang untuk pemenuhan alat perlengkapan jalan 2) Data inventarisasi kondisi dan kebutuhan alat perlengkapan jalan (APJ) tidak diperbarui secara berkala 3) Rencana kerja tahunan tidak berbasis analisis resiko dan	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	Bupati	Tahun 2026
6	Masih tingginya timbulan sampah yang belum terolah di fasilitas pengelolaan sampah	RSP.25.03.01.13	1) Pembangunan TPST melalui usulan sektoral 2) Pembangunan TPS3R melalui APBD Prov, APBD Kabupaten dan dana desa 3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019, sebagai pengganti dan penyempurnaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana pengolahan sampah yang sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis, yang disebabkan oleh perencanaan berbasis data timbulan dan karakteristik sampah yang belum maksimal, keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan, lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta minimnya penerapan teknologi dan inovasi	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Bupati	Tahun 2026
7	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	RSP.25.04.01.14	Pendataan dan identifikasi RTLH berbasis desa/kelurahan secara berkala	1) Pendataan RTLH belum akurat dan terbaru 2) Perencanaan program perbaikan RTLH belum berbasis prioritas 3) Keterbatasan anggaran untuk penanganan dibandingkan dengan kebutuhan 4) Belum optimalnya peran Pokja PKP dan Forum PKP	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030
					Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2026-2030
					Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	Bupati	Tahun 2026-2030

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Kualitas air menurun	RSP.25.11.01.15	- Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2021-2051 - Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2012, dirubah dengan Perda nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2021 tentang RTRW - Keputusan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	- Pedoman pelaksanaan Perda PPLH belum disusun - SK Peta Jalan masih baru, belum ada tim implementasinya	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bupati	Tahun 2026 - 2027
2	Kualitas udara menurun	RSP.25.11.01.16			Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Bupati	Tahun 2026
3	Kualitas tutupan lahan menurun	RSP.25.11.01.17			Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Bupati	Tahun 2026-2027
					Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bupati	Tahun 2026
					Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokir baru)	Bupati	Tahun 2026-2029
4	Penanganan bencana belum optimal	RSP.25.05.01.18	- Peraturan Daerah (Perbup) Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 - Surat Edaran Bupati tentang Juknis dana desa (pengunaan dana desa untuk pembentukan destana) - Dokumen rencana kontijensi bencana - Terdapat Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	- Dokumen perlu diperbarui menyesuaikan dengan kajian risiko bencana terbaru - Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kebencanaan sesuai hasil kajian terbaru - Rencana kontijensi bencana baru dalam bentuk dokumen, belum dalam bentuk produk hukum, belum berdasarkan RPKB. serta belum semua	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	Bupati	Tahun 2027
					Menyusun SK Bupati tentang rencana kontingensi bencana	Bupati	Tahun 2025-2030
					Menyusun SE Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kecamatan dan desa guna meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun SE bupati terkait pembentukan sekolah tangguh bencana	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun SK Bupati tentang rencana aksi penanggulangan bencana	Bupati	Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
				jenis bencana memiliki dokumen kontijensi. - FPRB baru ada pada tingkat Kabupaten	Menyusun SE Bupati tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kampung iklim	Bupati	Tahun 2026

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian : 2025
Sasaran Strategis : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	RSP.25.26.01.19	- Sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang RIPDA 2013-2028 - Program Unggulan Dolan Purworejo pada RPJMD periode sebelumnya - Kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan amenitas - Pelatihan SDM Pariwisata - Juknis dana desa untuk pengembangan pariwisata - Kerjasama dengan biro wisata - Penyusunan paket wisata religi dari provinsi - Kalender event pariwisata yang	- Pembenahan daya tarik dan manajemen destinasi pariwisata - Belum ada MoU paket wisata dengan kab/kota sekitar - Paket wisata religi tidak berjalan dengan optimal	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	Bupati	Tahun 2026
					Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD	Bupati	Tahun 2026
					Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain	Bupati	Tahun 2026-2030
					Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044	Bupati	Tahun 2027-2028

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2	Produksi pertanian dan perikanan rendah	RSP.25.27.01.20	- Perda LP2B (Nomor Perda???) - SE Bupati tentang larangan alih fungsi lahan pada lokasi pembangunan prasarana pertanian (Nomor SE???) - Hibah sarpras pertanian (SK Bupati Nomor???) - Program Petani Milenial - Pengadaan obat untuk ternak, perkebunan, dan tanaman pangan untuk mengatasi serangan hama penyakit - Sekolah Lapang Iklim pada kelompok tani (pendampingan sejak awal bertanam, pengendalian pasca panen) setiap tahun - Pengusulan hibah sarpras perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan - Sertifikasi kecakapan nelayan dari Kementerian - Kolaborasi peningkatan kapasitas nelayan dengan pelatihan rancang bangun penangkapan ikan dengan narsum dari Balai Penelitian dan	- Belum optimalnya pelaksanaan program Petani Milenial - Belum terintegrasinya jaringan irigasi - Belum ada DED Kawasan Budidaya Udang dan Tambak Garam	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	Bupati	Tahun 2026
					Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres Percepatan Penanganan Irigasi	Bupati	Tahun 2026-2029
					Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	Bupati	Tahun 2026
3	Industri pengolahan belum optimal	RSP.25.31.01.21	- Usulan hibah pembangunan pabrik es dan gudang beku kepada KKP untuk menyimpan hasil perikanan	Kebijakan pengembangan industri pengolahan belum ielas	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
					Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bupati	Tahun 2026
4	Rendahnya investasi	RSP.25.18.01.22	- Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi (tanggal?)	- Belum ada kajian dan Perbup RUPM - Belum ada dokumen IPRO (katalog investasi)	Menyusun Perbup RUPM	Bupati	Tahun 2026
					Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bupati	Tahun 2026
					Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas Investasi	Bupati	2025
5	Rendahnya daya saing UMKM	RSP.25.17.01.23	- SK Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah - Sudah ada kolaborasi pentahelix untuk optimalisasi fungsi PLUT	- Belum ada roadmap peran dan fungsi PLUT - PKS belum disahkan	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Percepatan akses keuangan daerah	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Optimalisasi Peran PLUT	Bupati	Tahun 2026
					Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	Bupati	Tahun 2026
6	Kapasitas fiskal daerah terbatas	RSP.25.37.01.24	Koordinasi optimalisasi dana CSR	Sinkronisasi kebijakan pemanfaatan sumber dana alternatif belum ada	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Bupati	Tahun 2026-2030
					Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2026-2030

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
					Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah	Bupati	Tahun 2027
7	Daya saing angkatan kerja rendah	RSP.25.07.01.25	- Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah 2022-2027 - Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah	- Dokumen baru sampai tahun 2027 - Belum ada Roadmap/ Rencana Pelatihan Tenaga Kerja - Pelatihan belum berdasarkan kebutuhan dunia kerja	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	Bupati	Tahun 2028
					Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	Bupati	Tahun 2026
8	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal	RSP.25.09.01.26	1. Sosialisasi Gerakan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) di sekolah, PKK maupun posyandu 2. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 3. Sinergi produk poklaser (kelompok pengolah dan pemasar ikan) dengan program pemberian makanan tambahan lokal 4. Peraturan Daerah (Perda) 20/2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum memiliki peta/ rencana yang jelas	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	Bupati	Tahun 2026
9	Ketersediaan pangan terbatas	RSP.25.09.01.27	sama dengan produksi pertanian - Juknis dana desa untuk ketahaan pangan - ~~cadangan pangan~~	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum memiliki peta/ rencana yang jelas	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	Bupati	Tahun 2026
10	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25.09.01.28	penyusunan dokumen FSVA	Dokumen yang ada belum cukup detail serta belum ada tim	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis	Bupati	Tahun 2026-2029
					SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	Bupati	Tahun 2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
					Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk stabilisasi harga pangan	Bupati	Tahun 2026

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo

Tahun Penilaian : 2025

Sasaran Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	RSP.25.33.01.29	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017	Pedoman perlu di sesuaikan pengoptimalan sistem manajemen kinerja	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	Bupati	Tahun 2027
2	Hasil kinerja kurang berdampak	RSP.25.33.01.30	- Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.0.6.3/217/2025 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Perubahan indikator dan formula perhitungan target kinerja PD	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Bupati	Tahun 2025
					Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Bupati	Tahun 2026-2029
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	RSP.25.33.01.31	Memaksimalkan personil yang ada	- Pengusulan pemenuhan kebutuhan formasi APIP - pembentukan tim evaluator lintas PD - Korin/atensi blm kepada semua OPD	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	Bupati	Tahun 2026
					Peyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Bupati	Tahun 2026-2030
					Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	Bupati	Tahun 2026-2030
					Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	Bupati	Tahun 2026-2030

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Penerapan SPBE belum optimal	RSP.25.16.01.32	- pengelolaan inovasi proses bisnis SPBE - Membentuk dan mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi SPBE sebagai penggerak utama penerapan SPBE - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mengadopsi manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan yang sesuai dengan standar nasional. - Melaksanakan audit aplikasi SPBE untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan meningkatkan kualitas layanan. - Peraturan Bupati (Perbup) No 23 tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/313/2024 tentang Pembentukan tim koordinasi SPBE - Kompetensi SDM untuk kompetensi keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.	- Belum memiliki peta rencana/ roadmap SPBE - Belum ada program kerja tim - belum menerapkannya manajemen pengetahuan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan - Kompetensi SDM SPBE belum terpenuhi seluruhnya	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	Bupati	Tahun 2026
					Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Bupati	
					Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	Bupati	Tahun 2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	RSP.25.38.01.33	- Peraturan Bupati nomor 112 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta - Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2022 tentang Mutasi ASN - Peraturan Bupati nomor 198 tahun 2021 tentang pola karir - SE Bupati tentang Pengembangan Kompetensi - Peraturan Bupati tentang Penghargaan PNS Berprestasi	- Perbup Manajemen Talenta sudah kurang sesuai instrumennya - Panduan tentang pengembangan kompetensi baru sebatas SE dan substansinya belum optimal	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	2025-2029
					Revisi Perbup Manajemen Talenta	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup Corpu	Bupati	Tahun 2025
					Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	Bupati	Tahun 2025
6	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	RSP.25.33.01.34	- Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2016 tentang pengelolaan benturan kepentingan - kebijakan tata kelola pengadaan - kebijakan untuk peningkatan inovasi dalam bentuk Perbup 89 tahun 2024 tentang TPP - Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2014 Budaya Kerja ASN - Peraturan Bupati 46 tahun 2017 tentang pelayanan publik - Peraturan Bupati tentang kode etik ASN - Peraturan Bupati tahun 2018 tentang	- Perbup Budaya Kerja belum mencakup tentang ASN Berakhlak - Perbup kode etik UKPBJ sudah tidak relevan	Revisi Perbup Budaya Kerja	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	Bupati	Tahun 2026
					Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2025
					SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	Bupati	Tahun 2026
					SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	Bupati	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	RSP.25.33.01.35	- kebijakan pembentukan tim kerja - Peraturan Bupati nomor 116 tahun 2022 tentang Pengelolaan risiko - SE arah kebijakan 5 tahun dan tahunan - Penggunaan aplikasi sawiji - Peraturan Bupati 114 tahun 2023 tentang Sistem kerja dan sudah diimplementasikan dengan pembentukan tim kerja	- implementasi tim kerja belum optimal - belum ada evaluasi tim kerja - dokumen MR disusun setelah penyusunan dokumen perencanaan selesai, sehingga RTP yang disusun belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan - apliaksi sawiji masih sebatas pada evaluasi dan kinerja fisik /kinerja PD belum digunakan atau terintegrasi dengan kinerja individu	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	Bupati	Tahun 2026
					SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Bupati	Tahun 2025
					Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	Bupati	Tahun 2025
8	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.33.01.36	- SOP pelayanan - Peraturan Bupati 46 tahun 2017 - Peraturan Bupati 12 tahun 2025	- Belum terdapat pedoman yang jelas terkait rencana aksi pelayanan publik - Sosialisasi belum maksimal	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	Tahun 2025-2029
					Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	Bupati	Tahun 2026
9	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	RSP.25.33.01.37	Memaksimalkan kinerja Perangkat Daerah	Belum ada pedoman dan rencana aksi di tingkat daerah	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Bupati	2025-2029
					Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029		Tahun 2026
					SK Bupati tentang pembentukan tim RB		Tahun 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
10	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	RSP.25.35.01.38	Peraturan Bupati nomor 116 tahun 2022 tentang pengelolaan risiko	- Perbup pengelolaan risiko perlu di sesuaikan - Penatausahaan BMD belum maksimal - Penjenjangan kinerja belum cukup jelas - Budaya pengelolaan risiko masih rendah	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bupati	Tahun 2026
					Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Bupati	Tahun 2025
					SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Bupati	Tahun 2025
					Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	Bupati	Tahun 2026
					Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	Bupati	Tahun 2025
					Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	Bupati	Tahun 2025
11	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	RSP.25.24.01.39	Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2025 tentang aplikasi srikandi	Perbup masih baru, perlu dikawal implementasinya	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	Bupati	Tahun 2026
12	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	RSP.25.20.01.40			Revisi Perbup satu data	Bupati	Tahun 2025
					Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data		Tahun 2026
13	Kualitas kebijakan belum optimal	RSP.25.33.01.41	SE Bupati terkait mekanisme penerbitan produk hukum 2024	Substansinya belum jelas mengarah ke keterlibatan stakeholder eksternal	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	Bupati	Tahun 2025
14	Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	RSP.25.36.01.42	- Peraturan Daerah RPJMD - Peraturan Bupati Renstra - Perjanjian Kinerja - SK Metadata	Dokumen eksisting belum menggambarkan penjenjangan kinerja yang jelas	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Bupati	Tahun 2025
15	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran	RSP.25.35.01.43	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	Kesepakatan perlu dipertegas lagi isinya	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	Bupati	Tahun 2026-2030

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
16	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	RSP.25.35.01.44	Peraturan Bupati tentang Kode Etik UKPBJ	Perbup perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	Bupati	Tahun 2025
17	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	RSP.25.35.01.46	- Memaksimalkan personil yang ada	Akses audit internal terbatas	Penyusunan Piagam Audit Internal	Bupati	Tahun 2025
18	Penyalahgunaan aset/BMD	RSP.25.37.01.48	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Perda sudah terlalu lama - Pedoman pengelolaan BMD belum ada	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	Bupati	Tahun 2026
					Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	Bupati	Tahun 2026-2029
19	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	RSP.25.37.01.49	- Peraturan Bupati No. 54 Th 2024 - Juklak Pemungutan Pajak Daerah - Peraturan Bupati 83 TAHUN 2024 tentang Retribusi Perijinan Tertentu - Peraturan Bupati 60 TAHUN 2024 tentang Retribusi Jasa Umum - Peraturan Bupati 90 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Usaha - SK Bupati - SOP Pemungutan Pajak Daerah (Pengawasan Pajak Daerah) - Peraturan Bupati Pwr No. 1 Th 2025 - Opsen Pajak MBLB - SK Peta Jalan (Road Map) ETPD Kab.	SOP tentang pemungutan retribusi dan opsen belum ada	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	Bupati	Tahun 2025
					SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	Bupati	Tahun 2025
					SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan pemungutan Retribusi Daerah	Bupati	Tahun 2025

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Sasaran Strategis

: Kabupaten Purworejo
: 2025
: Meningkatkan kualitas manusia

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Penyampaian surat	Dindikbud	Kemenag	Triwulan IV 2025		
2	Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaraan PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	- Penyampaian surat - Rapat Koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Forum PKBM	Dindikbud	- PKBM - Dewan Pendidikan - Masyarakat	Triwulan I 2026		
3	Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi pada forum-forum yang sudah ada di Masyarakat	- Surat Edaran - Sosialisasi	Dindikbud	- Pemerintah Desa - Organisasi - Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) - Masyarakat	Triwulan I 2026		
4	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	- Penyampaian surat - Sosialisasi	Bapperida	- Perangkat Daerah - Organisasi terkait - Masyarakat	Triwulan IV		
5	Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	- Sosialisasi - Penyampaian surat	Dindikbud	- Satuan Pendidikan	Triwulan II 2026		
6	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	- Pembahasan Raperbup	Bag. Pemerintahan	- Tim pembahas - Instansi terkait SPM	Triwulan III 2026		
7	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	- Penyampaian surat - Sosialisasi	Dinkesda	- Pemerintah Desa - Organisasi - Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) - Masyarakat	Penyusunan Draf SE : Agustus Pembahasan SE : September Penetapan SE ; Oktober		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Rapat Pembahasan Perbup	Dinkesda	Tim Pembahas	Fasilitasi Perbup : Oktober Harmonisasi Perbup : November Penetapan Perbup : Desember		
9	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkesda	- Instansi terkait - Lembaga Pendidikan - Fasilitas Kesehatan - Pelaku usaha terkait - Masyarakat	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 :		
10	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	- Rapat pembahasan SK	Dinkesda	- Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	- Triwulan II 2027		
11	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	- Surat permohonan personil tim pelaksana dan pemantauan - Rapat-rapat koordinasi tim	Dinkesda	- Instansi terkait - Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	- Triwulan II 2027		
12	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	- Rapat pembahasan SK	Dinkesda	- Tim Pelaksana dan Pemantauan STBM	- Triwulan II 2026		
13	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	- Penyampaian surat - Sosialisasi	Dinsosdaldukkb	- Pemerintah Desa - Instansi terkait	Triwulan IV 2025		
14	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	- Penyampaian surat - Sosialisasi	DPPPAPMD	- Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun		
15	Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	- Surat Keputusan	- DKUKMP - Dinsosdaldukkb - Instansi terkait hibah dan bantuan sosial	- Instansi terkait	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
16	Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	Dokumentasi	Bag. Perekonomian	- Instansi terkait	Setiap mendekati hari besar keagamaan		

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Sasaran Strategis

: Kabupaten Purworejo
: 2025
: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	- Sosialisasi	DPPAPMD	- Camat - Masyarakat - Pemerintah Desa - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun		
2	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	- Sosialisasi	Bapperida	- Instansi terkait	Setiap tahun		
3	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	- Sosialisasi	DPUPR	- Instansi terkait	Triwulan II 2027		
4	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	- Sosialisasi - Koordinasi	DPUPR	- Perangkat Daerah - Pemerintah Desa - Masyarakat	Triwulan IV 2025		
5	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan Masyarakat	- Sosialisasi	DPUPR	- Perangkat Daerah - Pemerintah Desa - Masyarakat	Triwulan IV 2027		
6	Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	- Sosialisasi	Dinkominfo sasaran	- Instansi terkait	Triwulan IV Tahun 2026		
7	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	- Rapat koordinasi	Dinhub	- Instansi terkait	Triwulan IV 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	- Rapat pembahasan/ penyusunan	DLHP	- Satgas penuntasan sampah - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan III dan IV 2026		
9	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	- Rapat koordinasi	Bapperida	- Pengusaha - Instansi terkait	Triwulan II setiap tahun		
10	Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	- Rapat koordinasi	Bag. Kesra	- Baznas - Perangkat Daerah terkait	Minimal 2x dalam setahun		

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**Nama Pemda****: Kabupaten Purworejo****Tahun Penilaian****: 2025****Sasaran Strategis****: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkesda	- Instansi terkait - Pelaku usaha terkait - Masyarakat	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 :		
2	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	- Rapat pembahasan/ penyusunan	Dinkesda	- Satgas penuntasan sampah - Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan II 2027		
3	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	- Surat permohonan personil - Rapat pembahasan	Dinkesda	- Satgas penuntasan sampah - Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan II 2027		
4	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkesda	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait - Pemerintah Desa - Masyarakat	- Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	DLHP	- Instansi terkait - Lembaga Pendidikan - Fasilitas Kesehatan - Pelaku usaha terkait Mebereskan	Triwulan III dan IV 2026		
6	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Rapat pembahasan SK	DLHP	- Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 :		
7	Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	- Surat permohonan personil tim pelaksana dan pemantauan - Rapat-rapat koordinasi tim	DLHP	- Instansi terkait - Tim Pelaksana dan Pemantauan PHBS	Triwulan IV 2025		
8	Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	- Rapat pembahasan SK	DPUPR	- Tim Pelaksana dan Pemantauan STBM	- Triwulan II 2026 : Persiapan - Triwulan II dan III 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan IV 2026 : Penetapan dan Sosialisasi		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
9	Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokir baru)	- Rapat koordinasi	Bapperida	- Tim penyusun RKPD - Instansi terkait - Anggota DPRD	- Triwulan I		
10	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	- Rapat-rapat penyusunan - Sosialisasi	BPBD	- Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan I : Penyusunan dokumen - Triwulan II : Sosialisasi		
11	Menyusun SK Bupati tentang rencana kontingensi bencana	- Rapat pembahasan - Sosialisasi	BPBD	- Masyarakat - Instansi terkait	- Tahun 2025 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2026 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang - Tahun 2027 : Renkon Kekeringan dan KLB - Tahun 2028 : Renkon Karhutla dan Longsor - Tahun 2029 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2030 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang		
12	Menyusun SE Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kecamatan dan desa guna meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana	- Sosialisasi	BPBD	- Kecamatan - Pemerintah Desa	Triwulan IV 2025		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
13	Menyusun SE bupati terkait pembentukan sekolah tangguh bencana	- Sosialisasi	BPBD	- Satuan Pendidikan kewenangan Kabupaten - Satuan Pendidikan Non Formal - Instansi terkait	Triwulan IV 2025		
14	Menyusun SK Bupati tentang rencana aksi penanggulangan bencana	- Rapat pembahasan/ koordinasi	BPBD	- Kecamatan - Pemerintah Desa - Instansi terkait - Masyarakat - Satuan Pendidikan	Triwulan IV 2025		
15	Menyusun SE Bupati tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kampung iklim	- Rapat pembahasan/ koordinasi - Pendampingan	DLHP	- Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan II 2026		

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**Nama Pemda****: Kabupaten Purworejo****Tahun Penilaian****: 2025****Sasaran Strategis****: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DPPAPMD	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun		
2	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	- Rapat koordinasi	Bapperida	- Pengusaha - Instansi terkait	Triwulan II setiap tahun		
3	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan IV		
4	Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Perekonomian	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Triwulan IV		
5	Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Pemerintahan	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Sesuai kebutuhan		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	- Aplikasi SIPURI	Dinporapar	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	- Triwulan I Identifikasi kebijakan dan FGD lintas sektoral tentang pengembangan pariwisata - Triwulan II dan III Draft dan pembahasan - Triwulan IV Pentapan SK		
7	Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinporapar	- Pemerintah Desa - Camat - Masyarakat - Instansi terkait	Tahun 2027 Naskah Akademik Tahun 2028 Penetapan Perda		
8	Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres Percepatan Penanganan Irigasi	- Penyampaian surat	DPUPR	- Pemerintah Pusat - Instansi terkait			
9	Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV Tahun 2026		
10	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)		
11	Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinperintransnaker	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV		
12	Menyusun Perbup RUPM	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DINPMPTSP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	- Tahun 2025 (kajian RUPM) - Tahun 2026 (Perbup RUPM)		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
13	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPAD	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan I 2026		
14	Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas Investasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DINPMPTSP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV 2025		
15	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Percepatan akses keuangan daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Perekonomian	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026		
16	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKUKMP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026		
17	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Optimalisasi Peran PLUT	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKUKMP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026		
18	Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Pemerintahan	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV		
19	Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPAD	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Tahun 2027		
20	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinperintransn aker	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2028		
21	Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinperintransn aker	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan II 2026		
22	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait			

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
23	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis (Tandatangan Bupati)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKPP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV		
24	SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKPP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan I tahun berikutnya		
25	Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk stabilisasi harga pangan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	DKPP	- Instansi terkait - Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV 2026		

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**Nama Pemda****: Kabupaten Purworejo****Tahun Penilaian****: 2025****Sasaran Strategis****: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)		
2	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I 2026		
3	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV		
4	Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV		
5	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025		
6	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Setiap ada perubahan target		
7	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II 2026		
8	Peyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun		
9	Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
10	Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I setiap tahun		
11	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinkominfo sandi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II 2026		
12	Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II 2026		
13	Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkominfo sandi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait			
14	Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	Dinkominfo sandi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait			
15	Revisi Perbup Manajemen Talenta	- Rapat pembahasan Perbup - Sosialisasi Perbup	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 :		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
16	Penyusunan Perbup Corpu	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 :		
17	Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 :		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
18	Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BKPSDM	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 :		
19	Revisi Perbup Budaya Kerja	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III		
20	Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV		
21	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Barjas	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025		
22	SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Barjas	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan II		
23	SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III		
24	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan I		
25	SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
26	Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III		
27	Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025		
28	Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III tahun 2026		
29	SK Bupati tentang pembentukan tim RB	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Organisasi	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV		
30	Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	Rapat koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III Tahun 2025		
31	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025		
32	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Dinpusip	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2026		
33	Revisi Perbup satu data	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2025		
34	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bapperida	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2026		
35	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Bag. Hukum	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV setiap tahun		
36	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III (Perubahan) dan IV (Murni)		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
37	Penyusunan Piagam Audit Internal	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	Inspektorat	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV		
38	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan IV 2026		
39	Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Tahun 2026-2029		
40	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025		
41	SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025		
42	SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan pemungutan Retribusi Daerah	- Sosialisasi/ Rapat Koordinasi	BPKPAD	- Perangkat Daerah terkait - Instansi terkait	Triwulan III 2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025
 Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas manusia

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan IV 2025		
2	Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaraan PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan I 2026		
3	Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi pada forum-forum yang sudah ada di Masyarakat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan I 2026		
4	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV		
5	Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dindikbud	Triwulan II 2026		
6	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Pemerintahan	Triwulan III 2026		
7	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	Penyusunan Draf SE : Agustus Pembahasan SE : September Penetapan SE : Oktober		
8	Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	Fasilitasi Perbup : Oktober Harmonisasi Perbup : November Penetapan Perbup : Desember		
9	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Societisasi		
10	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027		
11	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027		
12	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2026		
13	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinsosdaldukkb	Triwulan IV 2025		
14	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPPPAPMD	Triwulan I setiap tahun		
15	Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	- DKUKMP - Dinsosdaldukkb - Instansi terkait hibah dan bansos	Triwulan II 2026		
16	Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Perekonomian	Setiap mendekati hari besar keagamaan		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025
 Sasaran Strategis : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPPPAPMD	Triwulan I setiap tahun		
2	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Setiap tahun		
3	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penediaan Air Minum (RISPAM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	Triwulan II 2027		
4	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	Triwulan IV 2025		
5	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	Triwulan IV 2027		
6	Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfo	Triwulan IV Tahun 2026		
7	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinhub	Triwulan IV 2026		
8	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan III dan IV 2026		
9	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSPL di Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan II setiap tahun		
10	Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Kesra	Minimal 2x dalam setahun		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025
 Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi		
2	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027		
3	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2027		
4	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkesda	- Triwulan II 2026		
5	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan III dan IV 2026		
6	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi		
7	Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan IV 2025		
8	Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR	- Triwulan II 2026 : Persiapan - Triwulan II dan III 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan IV 2026 : Penetapan dan Sosialisasi		
9	Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokok Pikiran)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	- Triwulan I		
10	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	- Triwulan I : Penyusunan dokumen - Triwulan II : Sosialisasi		
11	Menyusun SK Bupati tentang rencana kontingensi bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	- Tahun 2025 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2026 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang - Tahun 2027 : Renkon Kekeringan dan KLB - Tahun 2028 : Renkon Karhutla dan Longsor - Tahun 2029 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2030 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir		
12	Menyusun SE Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kecamatan dan desa guna meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025		
13	Menyusun SE bupati terkait pembentukan sekolah tangguh bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025		
14	Menyusun SK Bupati tentang rencana aksi penanggulangan bencana	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPBD	Triwulan IV 2025		
15	Menyusun SE Bupati tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kampung iklim	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DLHP	Triwulan II 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2025
 Sasaran Strategis : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan <u>Desa yang Bersumber dari Dana Desa</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPPAPMD	Triwulan I setiap tahun		
2	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan II setiap tahun		
3	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV		
4	Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Perekonomian	Triwulan IV		
5	Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Pemerintahan	Sesuai kebutuhan		
6	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinporapar	- Triwulan I Identifikasi kebijakan dan FGD lintas sektoral tentang pengembangan pariwisata - Triwulan II dan III Draft dan pembahasan - Triwulan IV		
7	Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinporapar	Tahun 2027 Naskah Akademik Tahun 2028 Penetapan Perda		
8	Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres <u>Percepatan Penanganan Irigasi</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DPUPR			
9	Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV Tahun 2026		
10	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)		
11	Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan <u>Rencana Pembangunan Industri</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinperintransnaker	Triwulan IV		
12	Menyusun Perbup RUPM	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DINPMPTSP	- Tahun 2025 (kajian RUPM) - Tahun 2026 (Perbup RUPM)		
13	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim <u>Pemanfaatan Barang Milik Daerah</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan I 2026		
14	Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas <u>Investasi</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DINPMPTSP	Triwulan IV 2025		
15	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi <u>Percepatan akses keuangan daerah</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Perekonomian	Triwulan II 2026		
16	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKUKMP	Triwulan II 2026		
17	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi <u>Optimalisasi Peran PLUT</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKUKMP	Triwulan II 2026		
18	Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Pemerintahan	Triwulan IV		
19	Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk <u>melakukan pinjaman daerah</u>	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Tahun 2027		
20	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinperintransnaker	Triwulan II 2028		
21	Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinperintransnaker	Triwulan II 2026		
22	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida			
23	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis (Tandatangan Bupati)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKPP	Triwulan IV		
24	SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKPP	Triwulan I tahun berikutnya		
25	Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk stabilisasi harga pangan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	DKPP	Triwulan IV 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian	: 2025
Sasaran Strategis	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 Triwulan I (2027-2029)		
2	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan I 2026		
3	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV		
4	Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV		
5	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV 2025		
6	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Setiap ada perubahan target		
7	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan II 2026		
8	Penyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun		
9	Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun		
10	Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun		
11	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfoستاساندي	Triwulan II 2026		
12	Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan II 2026		
13	Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfoستاساندي	Triwulan II 2026		
14	Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinkominfoستاساندي	Tahun 2026-2029		
15	Revisi Perbup Manajemen Talenta	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 :		
16	Penyusunan Perbup Corpu	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 :		
17	Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 :		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
18	Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BKPSDM	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 :		
19	Revisi Perbup Budaya Kerja	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan III		
20	Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV		
21	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Barjas	Triwulan IV 2025		
22	SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Barjas	Triwulan II		
23	SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan III		
24	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan I		
25	SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2025		
26	Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan III		
27	Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2025		
28	Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan III tahun 2026		
29	SK Bupati tentang pembentukan tim RB	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Organisasi	Triwulan IV		
30	Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III Tahun 2025		
31	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2025		
32	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Dinpusip	Triwulan III 2026		
33	Revisi Perbup satu data	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan IV 2025		
34	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bapperida	Triwulan III 2026		
35	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Bag. Hukum	Triwulan IV setiap tahun		
36	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III (Perubahan) dan IV (Murni)		
37	Penyusunan Piagam Audit Internal	Koordinasi/ monitoring secara berkala	Inspektorat	Triwulan IV		
38	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan IV 2026		
39	Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Tahun 2026-2029		
40	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III 2025		
41	SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III 2025		
42	SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan pemungutan Retribusi Daerah	Koordinasi/ monitoring secara berkala	BPKPAD	Triwulan III 2025		

